

CATATAN PERJALANAN IJRS 2024

**Memperkokoh Kembali Fondasi
untuk Memperkuat Reformasi Kebijakan &
Tata Kelola Kelembagaan Berbasis Keadilan
yang Berorientasi Masyarakat**

KATA PENGANTAR**Ketua Perkumpulan
IJRS
2021-2024**

Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota perkumpulan, badan pekerja, peneliti rekanan, mitra strategis, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung langkah-langkah Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Laporan tahunan ini mencerminkan tidak hanya capaian kolektif yang telah ditorehkan IJRS, tetapi juga semangat berkelanjutan dan komitmen sesuai visi lembaga untuk mewujudkan “peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional” melalui 3 misi lembaga yang berfokus pada penelitian hukum dan sosial berbasis bukti yang dapat dipercaya dan berkualitas, dukungan pada pemangku kepentingan terkait isu-isu hukum strategis, serta pemberdayaan masyarakat demi kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan social.

Di tengah dinamika sosial dan hukum yang semakin kompleks, di usia ke enamnya, IJRS berhasil menunjukkan konsistensinya dalam menghasilkan kerja-kerja berbasis bukti, advokasi kebijakan yang berdampak, serta penguatan akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan. Sepanjang tahun ini, IJRS telah bermitra dengan berbagai lembaga pemerintah dan kementerian, lembaga bantuan nasional serta internasional, lembaga peradilan, universitas, media, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.





Kolaborasi tersebut membuahkan capaian konkret di berbagai sektor prioritas. Dalam reformasi hukum acara pidana, IJRS terlibat dalam penyusunan RPP KUHP 2023, PERMA tentang pemidanaan terorisme, hingga kajian *cost of crime* dalam perkara narkoba. Dalam sektor tata kelola kelembagaan, IJRS mendukung penguatan sistem kepegawaian kejaksaan, penyusunan RPJMN 2025–2029, serta pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan HAM. Di sisi perlindungan kelompok rentan, IJRS mengembangkan platform KataHukum.id sebagai portal informasi hukum, memfasilitasi pelatihan advokat dalam menangani kekerasan seksual, serta melakukan kajian terhadap disparitas pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual. Portal ini diluncurkan pada acara mini-festival bertajuk SHElebrate x KataHukum.id sebagai bagian dari peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Acara ini menjadi momen penting bagi IJRS dalam memperkuat kesadaran publik, khususnya generasi milenial dan Gen Z, mengenai hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. IJRS juga aktif dalam Koalisi 18+ untuk penghapusan perkawinan anak dan advokasi penguatan dana bantuan korban. Selain itu, menyadari pentingnya aspek hukum lain di bidang keperdataan dan komersial, IJRS juga turut mendorong pembaruan hukum acara perdata melalui kegiatan seminar publik serta penguatan kerangka hukum acara perdata di sektor bisnis. Kegiatan ini menyoroti pentingnya modernisasi hukum perdata agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan praktisi hukum, khususnya advokat dan BUMN.

Tidak hanya dalam capaian program, namun IJRS juga terus melakukan penguatan dalam tata kelola kelembagaan seperti penguatan *branding* lembaga, tata kelola keuangan dan pengembangan kapasitas personil. IJRS yakin bahwa lembaga yang kuat dan berkelanjutan adalah lembaga yang memiliki fondasi tata kelola internal lembaga yang kuat. Dewan Pengurus terus berkomitmen untuk mengarahkan IJRS sebagai lembaga riset yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap perkembangan isu-isu hukum dan sosial di Indonesia. Arah strategis IJRS difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, diversifikasi sumber daya, serta perluasan dampak melalui riset yang relevan dan berbasis bukti di isu-isu yang lebih luas. IJRS terus memperkuat posisinya sebagai aktor riset independen yang mampu menjembatani antara kebutuhan kebijakan publik dan suara masyarakat sipil. Dalam menghadapi dinamika sosial-politik yang terus berkembang, IJRS diarahkan untuk tetap menjadi lembaga yang kritis, namun konstruktif, dalam memproduksi pengetahuan yang mendorong perubahan sistemik. IJRS percaya bahwa masa depan lembaga sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk tetap terbuka terhadap perubahan, sekaligus teguh memegang prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pendiriannya.

Tahun ini ditandai dengan transisi kepemimpinan strategis di tingkat eksekutif sesuai dengan semangat tata kelola kaderasi dan regenerasi. Pada Juli 2024, IJRS secara resmi melantik Direktur Eksekutif yang baru, Arsa Ilmi Budiarti, untuk masa jabatan 2024–2029, menggantikan Direktur sebelumnya, Dio Ashar Wicaksana. Pergantian ini memperkuat struktur organisasi IJRS untuk menjawab kebutuhan



kelembagaan yang terus berkembang. Selain itu, tahun 2024 juga menjadi akhir masa jabatan kepengurusan Perkumpulan IJRS periode 2021–2024. Berdasarkan Anggaran Dasar IJRS, seluruh kepengurusan dinyatakan berakhir pada 31 Desember 2024. Anggota perkumpulan akan diangkat kembali untuk periode kepengurusan berikutnya. Anggota perkumpulan lama ada yang meneruskan kepengurusannya, namun ada pula yang berganti dengan yang baru, sesuai kebutuhan lembaga. Proses ini penting untuk memastikan keberlanjutan tata kelola organisasi yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada visi jangka panjang IJRS.

Atas nama Dewan Pengurus IJRS periode 2021–2024, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan IJRS. Semoga laporan ini menjadi catatan bermakna sekaligus pijakan kuat bagi generasi penerus IJRS dalam membangun sistem hukum Indonesia yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hormat saya,

Nisa Istiani
Ketua Perkumpulan IJRS 2021-2024



KATA PENGANTAR

Direktur Eksekutif IJRS 2024-2029

Pada Juli 2024 lalu, saya diberi amanat untuk melanjutkan kepengurusan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai Direktur Eksekutif untuk periode 2024–2029. Tanggung jawab ini saya terima dengan penuh kesadaran, tidak hanya sebagai peran administratif atau manajerial, tetapi sebagai mandat moral dan intelektual untuk memastikan bahwa IJRS tetap menjadi lembaga riset hukum yang independen, progresif, dan berdampak nyata bagi pembangunan hukum Indonesia.

Lima tahun ke depan akan menjadi periode yang sangat menentukan bagi arah reformasi hukum nasional. Kita berada dalam masa transisi besar, di mana implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini tengah direvisi, pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta dinamika politik dan hukum global akan membawa tantangan dan peluang baru dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, IJRS mengambil peran sebagai aktor penyeimbang yang tidak hanya menyediakan bukti berbasis data untuk mendukung perumusan dan evaluasi kebijakan, tetapi juga mengusulkan inovasi pendekatan untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum di tingkat nasional maupun lokal.

Kami meyakini bahwa kompleksitas permasalahan hukum saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sektoral semata. Oleh karena itu, pendekatan interdisiplin menjadi salah satu pilar penting dalam kerja-kerja IJRS ke depan—mengintegrasikan perspektif sosial, ekonomi, gender, lingkungan, dan teknologi dalam menganalisis permasalahan hukum serta merumuskan solusi kebijakan. Dengan cara ini, kami berharap dapat menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, IJRS berkomitmen memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas dalam setiap lini kerja organisasi. Kami terus mengembangkan sistem internal yang kokoh—mulai dari penyusunan standar operasional prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penerapan prinsip keberagaman dan kesetaraan gender dalam organisasi. Prinsip ini kami terapkan bukan hanya sebagai kewajiban institusional, melainkan sebagai nilai dasar yang kami pegang dalam bekerja bersama komunitas, pembuat kebijakan, dan para mitra pembangunan.



Proses transisi kepemimpinan ini juga kami manfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kelembagaan IJRS secara menyeluruh—baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, strategi komunikasi, perencanaan program, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Kami menyadari bahwa keberlanjutan organisasi hanya dapat terwujud jika diiringi dengan pembaruan sistem, regenerasi tim kerja, dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Dalam lima tahun ke depan, fokus strategis kami akan mencakup empat area utama: (1) mendorong reformasi sistem peradilan pidana yang adil dan efektif, (2) memperluas akses terhadap keadilan khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal, (3) mendorong tata kelola kelembagaan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif, serta (4) mengembangkan ekosistem pengetahuan hukum yang kolaboratif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan pendanaan dan dinamika politik yang terus berubah, kami percaya bahwa kekuatan jejaring, prinsip perubahan berbasis bukti, dan inovasi pendekatan kebijakan tetap menjadi modal utama kami dalam mendorong perubahan sistemik.

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat sipil, kami juga memahami bahwa kerja-kerja reformasi kebijakan tidak bisa dilakukan sendirian. Oleh karena itu, IJRS akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra—baik dari sektor publik, akademik, swasta, maupun komunitas akar rumput. Secara khusus, kami juga akan terus memperluas jejaring kerja sama dengan mitra internasional, termasuk universitas, lembaga riset, dan organisasi pembangunan global, guna mendorong pertukaran pengetahuan, memperkaya pendekatan riset, serta memastikan bahwa praktik baik dari berbagai negara dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab tantangan hukum di Indonesia.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendiri IJRS, Dewan Pengawas dan Pengurus, seluruh tim kerja IJRS, mitra organisasi, donor, dan semua pihak yang telah dan akan terus berjalan bersama kami. Amanat yang kami emban bukan semata tentang lembaga, tetapi tentang harapan akan masa depan hukum Indonesia yang lebih inklusif, rasional, dan berpihak pada keadilan.

Hormat saya,

Arsa Ilmi Budiarti
Direktur Eksekutif IJRS 2024–2029



PROFIL IJRS



Indonesia Judicial Research Society (IJRS) adalah lembaga non-pemerintah yang berkomitmen untuk menawarkan solusi, melakukan advokasi dan memberikan edukasi berbasis bukti melalui riset yang handal dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

IJRS berdiri pada tahun 2018 dengan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Keberagaman ini mendorong IJRS mewujudkan visi dan misinya melalui asistensi di kelompok kerja pemerintah, pelaksanaan riset hukum dan sosial, advokasi bersama organisasi masyarakat sipil dan pemerintah, hingga pemberdayaan masyarakat. Keberagaman ini juga mendorong IJRS untuk tidak berhenti belajar dan memperluas perspektif pada isu-isu hukum peradilan pidana, akses keadilan, kelompok rentan, hingga tata kelola lembaga pemerintah.

Selengkapnya mengenai profil lembaga IJRS dapat dilihat di ijrs.or.id

Visi

IJRS sebagai lembaga *think tank* terdepan yang inklusif dan berintegritas untuk mewujudkan sistem hukum Indonesia yang adil, transparan, rasional, dan aksesibel bagi semua.

Misi

- ◆ **Meningkatkan kualitas dan dampak riset:** Melakukan riset hukum yang berkualitas, inovatif, dan multidisiplin, serta menerapkan metode riset yang beragam untuk menghasilkan bukti yang kuat dalam mendukung transformasi sistem hukum di Indonesia.
- ◆ **Meningkatkan profesionalisme kelembagaan:** Membangun sistem dan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia baik di internal IJRS maupun di eksternal (aparatur penegak hukum dan non-penegak hukum).
- ◆ **Mewujudkan advokasi kebijakan berbasis bukti:** Mendorong perubahan kebijakan berdasarkan hasil riset dan bukti yang kuat, serta melakukan advokasi yang efektif dan berdampak untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan rasional.



● **Anggota
Rekanan
Pakar**



Dr. Diani
Sadiawati, S.H., LL.M



Dr. Yunus
Husein, S.H., LL.M



Dr. Fachrizal
Afandi, S.Psi, S.H., M.H.



Dr. Alfindra Primaldhi,
B.A., S.Psi., M.Si.



Dr. Lidwina Inge
Nurtjahyo, S.H., M.Si.



Dr. Paksi C.K
Walandouw, S.E., M.A.



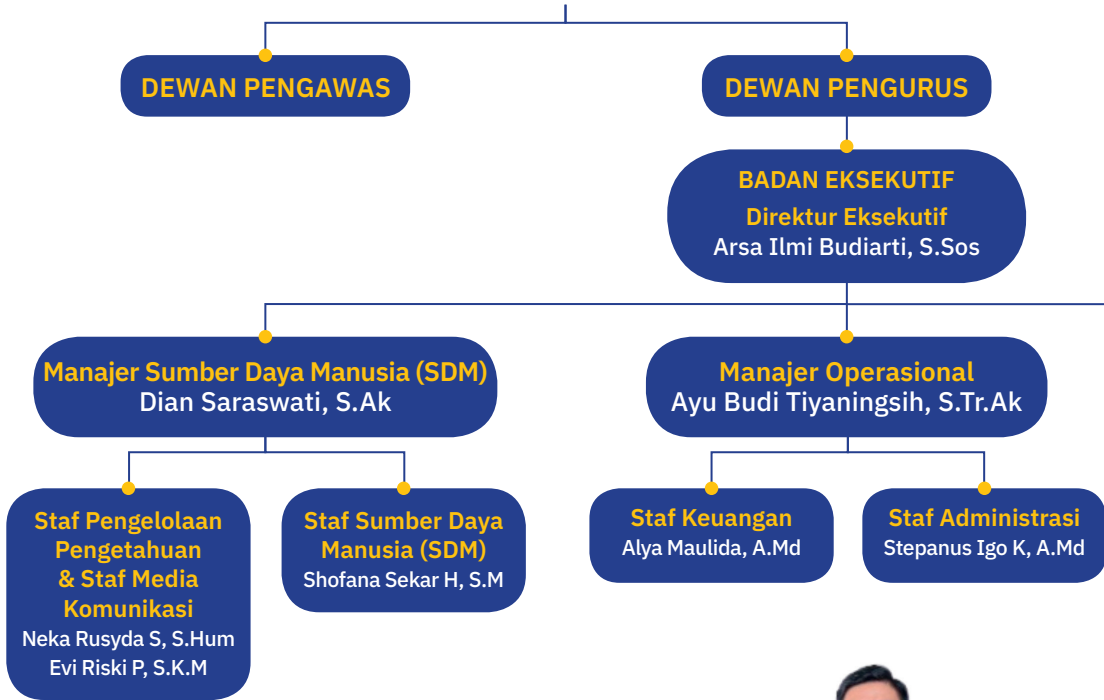
Muhammad Rizaldi
W., S.H., LL.M.

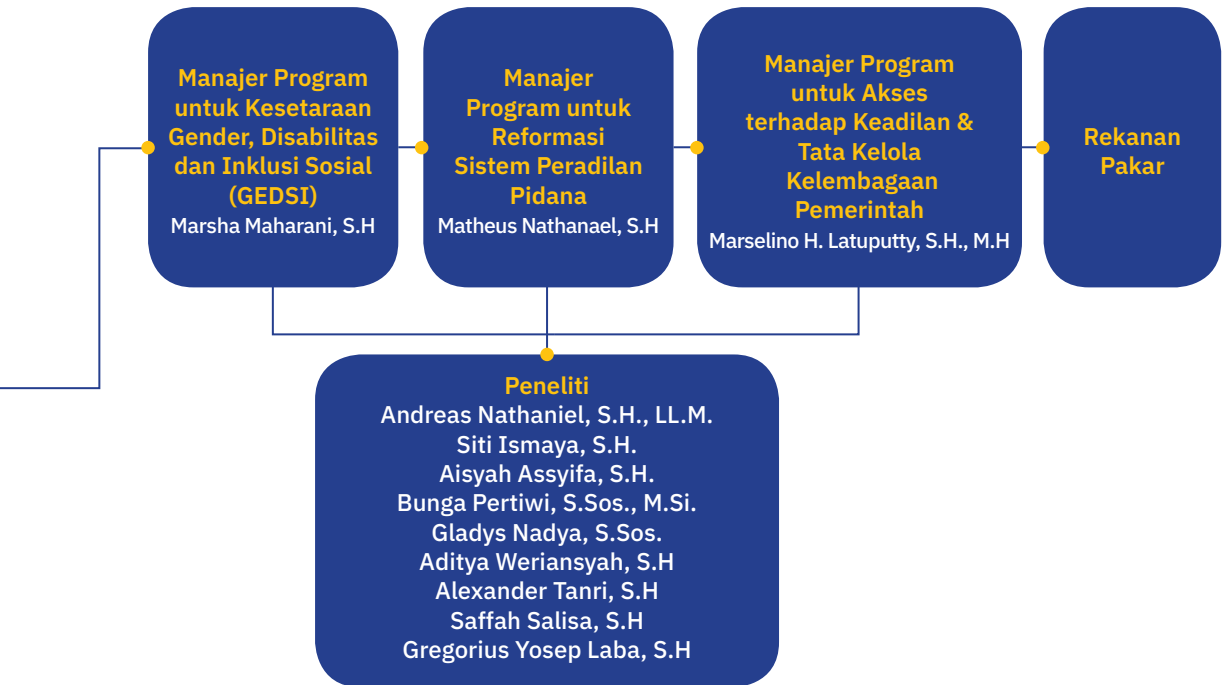


Theodora Yuni
Shah Putri, Ph.D.



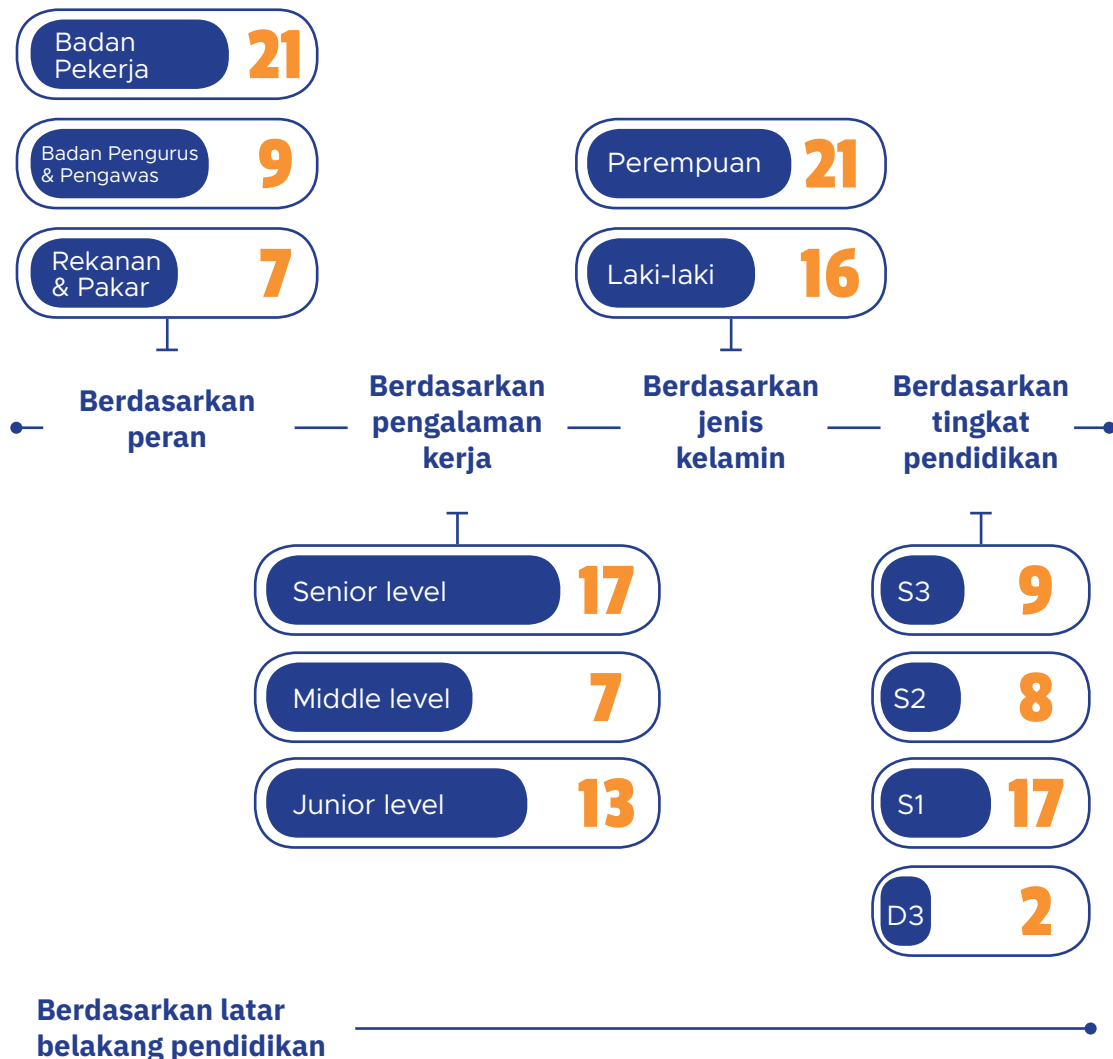
**PERKUMPULAN
INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)**





Komposisi Perkumpulan IJRS

| 14



Hukum Sosiologi Manajemen
Administrasi Bisnis Ekonomi Psikologi
Manajemen Sosiologi Administrasi Bisnis
Kriminologi Hukum Humaniora
Ekonomi Akuntansi Humaniora & Pengembangan Masyarakat



**KONTRIBUSI
IJRS UNTUK
PEMBANGUNAN
HUKUM
DI INDONESIA
TAHUN 2024**

Selama tahun 2024, IJRS terus berkomitmen untuk mendorong reformasi kebijakan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 3 (tiga) sektor berikut:

Reformasi Hukum Acara Pidana



Perluasan Akses Terhadap Keadilan dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah



Perlindungan Kelompok Rentan



1. Reformasi Hukum Acara Pidana

No	Kegiatan	Deskripsi
1	Kajian Perubahan Hukum Acara Pidana Pasca KUHP 2023	IJRS bersama dengan The Asia Foundation telah melakukan kajian mendalam tentang bagaimana dampak KUHP 2023 terhadap hukum acara kedepannya. Kajian ini dapat menjadi acuan untuk memastikan turunan yang tepat dari KUHP 2023 khususnya untuk Rancangan KUHPA kedepannya.
2	Koalisi RKUHPA bersama Pemerintah dan Masyarakat Sipil	IJRS bersama ICJR, LeIP, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, dsb. terlibat dalam advokasi untuk mendorong revisi terhadap KUHPA sebagai tindak lanjut dari adanya KUHP 2023. Advokasi ini memastikan adanya rancangan KUHPA yang tepat untuk penguatan penegakan hukum kedepannya.
3	Kajian Pidana Kerja Sosial & Pidana Pengawasan KUHP 2023	IJRS bersama ICJR dan LeIP terlibat dalam kajian dan penyusunan turunan peraturan pemerintah terhadap Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan sebagai tindak lanjut dari KUHP 2023. Adanya kajian dan penyusunan peraturan ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan jenis pidana yang dimandatkan sesuai KUHP 2023.
4	Penyusunan Buku dan Sosialisasi KUHP 2023 bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Bangka Belitung	IJRS bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Bangka Belitung menyusun buku penjelasan terkait pasal-pasal terkait dalam KUHP 2023 sebagai bahan acuan para jaksa untuk dapat memahami dan menggunakan KUHP 2023 dalam praktiknya kedepan.

No	Kegiatan	Deskripsi
5	Penelitian <i>Cost of Crime</i> dalam Perkara Narkotika	IJRS bersama AIPJ2 dan Seknas FITRA, ICJR, LBH Masyarakat, dan Lembaga Demografi UI mengadakan penelitian untuk mengukur biaya perkara yang dikeluarkan oleh pemerintah dan narapidana/mantan narapidana beserta keluarganya ketika berhadapan dengan proses hukum perkara narkotika. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menggambarkan biaya dan dampak dari proses tindak pidana yang dapat memakan waktu dan biaya yang besar sehingga diperlukan adanya reformasi dalam proses hukum acara maupun pembedaan dalam perkara narkotika itu sendiri.
6	Monitoring dan Evaluasi Pedoman Tuntutan Narkotika (PED 11/2021 & PED 18/2021)	IJRS melakukan penelitian terhadap implementasi peraturan di Kejaksaan terkait dengan penuntutan di perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong dan pengambat dilaksanakannya peraturan, termasuk dicabutnya peraturan. Penelitian ini dapat menjadi refleksi dan acuan kritis bagi penyusunan dan implementasi pedoman penuntutan di perkara narkotika kedepannya.
7	Penyusunan PERMA Pedoman Pemidanaan Narkotika	IJRS bersama AIPJ2 dan Mahkamah Agung menyusun Peraturan Mahkamah Agung terkait Pedoman Pemidanaan Narkotika yang dapat digunakan sebagai acuan para hakim untuk menjatuhkan pemidanaan yang lebih proporsional.
8	Koalisi untuk RUU Narkotika	IJRS bersama koalisi masyarakat sipil terlibat dalam advokasi reformasi undang-undang Narkotika untuk mendorong adanya penjatuhan pidana yg proporsional untuk tindak pidana narkotika yg <i>victimless & non-violent crimes</i> , mendorong adanya



No	Kegiatan	Deskripsi
		mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan pidana untuk perkara narkoba yg sifatnya ringan serta mendorong terbukanya praktik penelitian untuk narkoba, supaya kelak dapat dicari model pemanfaatan yg sesuai dengan masing-masing jenis narkoba yang ada.
9	Penyusunan Surat Edaran Konflik Kepentingan Mahkamah Agung	IJRS melakukan asistensi terhadap Mahkamah Agung dalam rapat-rapat pembahasan dan penyusunan SK KMA No. 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung.
10	Monitoring dan Evaluasi Pedoman Pemidanaan Korupsi di Mahkamah Agung	IJRS bersama Open Society Foundation sedang melaksanakan penelitian untuk melihat implementasi dari Pedoman Tindak Pidana Korupsi yang ada di Mahkamah Agung untuk melihat sejauh mana pedoman yang ada dapat atau tidak dapat diimplementasikan. Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan acuan perbaikan pengaturan pemidanaan tindak pidana korupsi kedepannya.
11	Penyusunan RPP & RUU Keadilan Restoratif	IJRS bersama ICJR, LeIP dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM terlibat dalam penyusunan peraturan terkait keadilan restoratif, sebagai respon atas adanya peraturan-peraturan internal terhadap keadilan restoratif di berbagai instansi penegak hukum yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi dan implementasi. Adanya peraturan ini dapat bermanfaat bagi implementasi keadilan restoratif yang lebih tepat kedepannya.
12	Penyusunan PERMA Pedoman Pemidanaan Terorisme	IJRS tergabung dalam Kelompok Kerja Mahkamah Agung bersama CDS dalam penyusunan peraturan internal Mahkamah Agung terkait pemidanaan terorisme untuk memastikan adanya penjatuhan pidana yang lebih tepat dalam perkara-perkara terorisme.



No	Kegiatan	Deskripsi
13	Penyusunan <i>Policy Brief</i> Rancangan PERJA Tindak Pidana Lingkungan Hidup terhadap Korporasi	IJRS bersama ICEL terlibat dalam kajian dan penyusunan risalah kebijakan terkait pedoman penuntutan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup di mana subjek hukumnya adalah korporasi. Rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi acuan bagi Kejaksaan untuk kedepannya menyusun pedoman atau peraturan Kejaksaan terkait tindak pidana tersebut.
14	Penyusunan Peraturan Pemerintah KUHP 2023 tentang Komutasi Hukuman	IJRS bersama Kementerian Hukum bekerjasama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHP tentang Perubahan Pidana. Selama proses penyusunan peraturan tersebut, IJRS terlibat dalam proses pembahasan isu, penyusunan daftar inventaris masalah dan penyusunan peraturan terkait perubahan pidana/komutasi terhadap Pidana Mati dan Seumur Hidup dalam KUHP 2023.
15	Penyusunan Peraturan Pemerintah KUHP 2023 tentang <i>Living Law</i>	IJRS bekerjasama dengan Kementerian Hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHP tentang <i>Living Law</i> . Selama proses penyusunan peraturan tersebut, IJRS terlibat dalam proses pembahasan isu, penyusunan daftar inventaris masalah dan penyusunan peraturan terkait aturan pelaksana pidana adat (<i>living law</i>) dalam KUHP 2023.



2. Perluasan Akses Terhadap Keadilan dan Penguatan Tata Kelola Pemerintah

No	Kegiatan	Deskripsi
1	Kajian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja Kejaksaan	IJRS bersama Sinergi Consulting dan Kejaksaan terlibat dalam penyusunan dan perapihan analisis jabatan dan beban kinerja di Kejaksaan untuk dapat menjadi acuan tata kelola kepegawaian di Kejaksaan.
2	Penegakan Kode Perilaku Jaksa (PERJA 4/2024)	IJRS bersama AIPJ2, MaPPI FHUI dan Kejaksaan terlibat dalam penyusunan peraturan terkait Kode Perilaku/Etik Jaksa untuk memastikan perilaku jaksa dalam penanganan perkara sesuai dengan etika dan standar yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya peraturan ini dapat bermanfaat untuk memastikan adanya jaminan akuntabilitas dan integritas jaksa kedepannya.
3	Penyempurnaan Tata Kelola Manajemen Kepegawaian Jaksa	IJRS bersama dengan Sinergi Consulting dan Kejaksaan RI terlibat aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa. Rancangan peraturan tersebut merupakan amanat terkait pengelolaan SDM Jaksa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang menegaskan bahwa Jaksa tidak hanya berperan sebagai pegawai negeri sipil yang mengemban Jabatan fungsional, tetapi juga memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyusunan RPP tentang Manajemen

No	Kegiatan	Deskripsi
		Kepegawaian Jaksa ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan manajemen SDM Jaksa, termasuk juga sebagai penataan substansi dan materi terkait kekhususan peran Jaksa.
4	Asistensi Rancangan RPJMN untuk Kejaksaan	IJRS melakukan asistensi bersama Kejaksaan dan Bappenas untuk melakukan pendalaman terhadap rencana prioritas Kejaksaan sesuai dengan Rancangan RPJMN 2025-2029 yang sedang disusun. Adanya asistensi ini memastikan agar tujuan yang sudah dirancang dalam RPJPN dapat diturunkan dengan tepat sasaran dan bermanfaat untuk reformasi tata kelola Kejaksaan.
5	Kajian Tata Kelola Kelembagaan Hukum sebagai Pendalaman RPJMN	IJRS bersama Bappenas melakukan kajian pendalaman untuk penguatan tata kelola kelembagaan hukum di Indonesia sebagai bahan penyusunan RPJMN dan identifikasi penguatan kelembagaan hukum kedepannya.
6	Indeks Pembangunan Hukum	IJRS bersama Bappenas melakukan pengukuran terhadap capaian pembangunan hukum di Indonesia. Pengukuran indeks dilakukan secara komposit untuk menilai sejauh mana capaian budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum dan informasi hukum di Indonesia. Pengukuran ini menjadi acuan untuk penyusunan RPJPN, RPJMN dan rencana aksi di bidang hukum di Indonesia.
7	Kajian Tata Kelola Victim Trust Fund	IJRS bersama LPSK terlibat dalam melakukan kajian terkait peran LPSK dan tata kelola Victim Trust Fund kaitannya dengan pemulihan korban tindak pidana



No	Kegiatan	Deskripsi
		kekerasan seksual maupun tindak pidana lainnya. Kajian ini dapat bermanfaat untuk menjadi acuan LPSK dalam memastikan tata kelola dana pemulihan korban secara lebih tepat sasaran.
8	Kajian Tata Kelola Dana Pemulihan Lingkungan Hidup	IJRS bersama Open Society Foundation dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) melakukan kajian terkait praktik tata kelola dana pemulihan lingkungan hidup saat ini dan rekomendasi untuk kedepannya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kejaksaan maupun BPD LH dan Kementerian Keuangan dalam memastikan dana pemulihan tindak pidana lingkungan hidup yang lebih tepat sasaran.
9	Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2025-2029	IJRS bersama Komnas HAM terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2025-2029 sebagai bahan acuan Komnas HAM untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
10	Penguatan Open Government Indonesia	IJRS bersama Open Government Partnership, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia, dan koalisi masyarakat sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia melaksanakan serangkaian upaya penguatan keterbukaan pemerintah Indonesia/ IJRS sebagai Koordinator Sekretariat Open Government Indonesia dari masyarakat sipil bersama para mitra masyarakat sipil lainnya melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional, keterlibatan dalam forum internasional hingga advokasi pemenuhan prinsip keterbukaan pemerintah Indonesia.



No	Kegiatan	Deskripsi
11	Asistensi dalam Indeks Hak Asasi Manusia	IJRS bersama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia melaksanakan pengukuran hak asasi manusia pertama kali di Indonesia yang menggunakan metode komposit. Indeks HAM ini digunakan sebagai acuan capaian pembangunan hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus menjadi masukan penguatan terhadap perbaikan implementasi hak asasi manusia kedepannya.
12	Pengarusutamaan Reformasi Hukum Acara Perdata	IJRS bersama The Asia Foundation melaksanakan kegiatan seminar publik terkait reformasi hukum acara perdata yang menggarisbawahi pentingnya terdapat perubahan terhadap hukum acara perdata di tengah berbagai perkembangan yang ada saat ini. Bersama juga dengan UMBRA Law, IJRS turut terlibat dalam penguatan hukum acara perdata khususnya di sektor bisnis dengan turut melibatkan para advokat dan BUMN untuk dapat memberikan masukan berdasarkan praktik yang ada saat ini.
13	Penguatan Pengaturan Pemberian Uang dan Barang/Pemajuan Filantropi Indonesia	IJRS bersama Yayasan Penabulu melakukan kajian dan penyusunan peraturan pemajuan filantropi Indonesia dan penguatan pengaturan pemberian uang dan barang agar dapat merespon situasi-situasi terkini secara lebih tepat, transparan dan akuntabel. Bersama koalisi filantropi Indonesia, IJRS mendorong adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah terkait pengumpulan uang dan barang.



3. Perlindungan Kelompok Rentan

No	Kegiatan	Deskripsi
1	Kajian Peta Advokasi RUU Anti-Diskriminasi	IJRS bersama CRM bekerjasama dalam mendorong adanya pengaturan terkait anti-diskriminasi untuk memastikan adanya kerangka hukum yang dapat menjamin pelaksanaan anti-diskriminasi di Indonesia. Untuk dapat memastikan hal ini, IJRS memastikan adanya pemetaan terhadap aktor kunci maupun langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan kerangka hukum tersebut dapat diadvokasikan.
2	Pengembangan Platform Kata Hukum	IJRS bersama AIPJ2 dan koalisi masyarakat sipil bekerjasama untuk mengembangkan portal data dan informasi hukum bernama “Kata Hukum” (katahukum.id) yang bertujuan untuk mendorong adanya <i>one-stop</i> portal untuk isu hukum termasuk pencarian rujukan bantuan hukum yang dapat membantu kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Portal ini diharapkan menjadi kanal bersama bagi masyarakat sipil dan penyedia layanan untuk dapat menyalurkan informasi hukum secara tepat sasaran dan tepat guna.
3	Penyusunan Modul dan Pelatihan Advokat terkait UU TPKS	IJRS bersama The Asia Foundation, Peradi dan OBH melaksanakan serangkaian kegiatan pelatihan dan penyusunan materi serta modul terkait UU TPKS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman advokat dalam memberikan bantuan hukum khususnya yang terkait dengan perkara kekerasan seksual. Modul yang dihasilkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi advokat dalam menangani kasus kekerasan seksual.





No	Kegiatan	Deskripsi
4	Monitoring dan Evaluasi Perma 3/2017 bersama Mahkamah Agung	IJRS bersama AIPJ2 dan Mahkamah Agung bekerjasama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan internal Mahkamah Agung No. 3/2017 terkait dengan Pedoman bagi Hakim dalam Menangani Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kegiatan ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana implementasi peraturan tersebut khususnya kepada perempuan yang melalui proses persidangan. Adanya hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penguatan akses terhadap keadilan yang inklusif kepada perempuan.
5	Monitoring dan Evaluasi Perma 5/2019 bersama Mahkamah Agung	IJRS bersama AIPJ2 dan Mahkamah Agung bekerjasama dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan internal Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Hakim dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin. Melalui evaluasi ini dapat diidentifikasi sejauh mana peran hakim dalam pencegahan maupun penanganan perkawinan anak yang masuk ke persidangan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan juga sebagai acuan untuk penguatan peran hakim kedepannya dalam berkontribusi untuk penurunan angka perkawinan anak di Indonesia.
6	Monitoring dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan 1/2021 bersama Kejaksaan Agung	IJRS bersama AIPJ2 dan Kejaksaan bekerjasama dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Melalui evaluasi ini diperoleh catatan pelaksanaan penanganan perempuan dan anak oleh jaksa yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengaturannya maupun implementasinya kedepan.



No	Kegiatan	Deskripsi
7	Kajian dan Pelaksanaan Pemberdayaan Hukum di Indonesia	IJRS bersama dengan Legal Empowerment Fund (LEF) bekerjasama untuk melaksanakan penguatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa Jangkar, Madura, Jawa Timur untuk dapat mengenali proses hukum, istilah-istilah hukum, identifikasi jenis permasalahan hukum, dan lain sebagainya. Pemahaman ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih berdaya dalam upaya akses keadilan jika berhadapan dengan hukum.
8	Kajian Pendalaman UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Penanganan Perempuan dan Anak di Mahkamah Agung dan Kejaksaan	IJRS bersama Mahkamah Agung dan Kejaksaan bekerja sama untuk melakukan pendalaman terhadap UU TPKS dan KUHP 2023 di isu terkait perempuan dan anak yang berhubungan dengan hakim dan juga jaksa. Adanya kajian pendalaman ini dapat bermanfaat bagi hakim dan jaksa untuk mengetahui bagaimana interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UU TPKS maupun KUHP 2023 yang dapat digunakan dalam penanganan perkara.
9	Penelitian Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Kekerasan Seksual	IJRS bersama AIPJ2, melakukan penelitian terkait disparitas pemidanaan putusan pengadilan di perkara kekerasan seksual. Adanya kajian ini menggarisbawahi pentingnya terdapat pedoman pemidanaan dan/atau penanganan perkara kekerasan seksual yang proporsional dan tepat. Sehingga disparitas yang ada dapat diminimalisir. Adanya kajian ini turut dapat menjadi referensi bagi Mahkamah Agung untuk melihat kembali penjatuhan vonis hukuman kepada pelaku kekerasan seksual khususnya dengan adanya UU TPKS saat ini.

No	Kegiatan	Deskripsi
10	Koalisi 18+ untuk Pencegahan Perkawinan Anak	IJRS bersama dengan PLAN, WVI, dan lebih dari 10 organisasi masyarakat sipil tergabung dalam Koalisi 18+ atau koalisi yang berfokus kepada pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Indonesia. Sebagai koordinator dari koalisi ini, IJRS bersama mitra masyarakat sipil bekerjasama untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya isu perkawinan anak, penelitian bersama terkait evaluasi kebijakan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak, advokasi kebijakan penghapusan perkawinan anak dan sebagainya.
11	Kajian Dana Bantuan Korban untuk Perkara Kekerasan Seksual	IJRS bersama dengan Open Society Foundation (OSF) dan mitra masyarakat sipil bekerjasama untuk melakukan kajian tentang mekanisme pemulihan korban kekerasan seksual sesuai dengan mandat UU TPKS sebagai alternatif pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Kajian ini memperdalam tentang bagaimana kebutuhan korban kekerasan seksual dalam hal pemulihannya, hingga mekanisme pemberian dana pemulihan yang tepat dan sesuai kebutuhan kepada korban kekerasan seksual.
12	Kajian Peran <i>Women Legal Professional</i> bersama LBH APIK	IJRS bersama dengan LBH APIK bekerjasama untuk melakukan kajian ringkas mengenai kondisi advokat perempuan saat ini di Indonesia, serta penguatan apa yang dibutuhkan oleh advokat untuk mendorong adanya peningkatan kapasitas teknis maupun substansi dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan isu kelompok rentan seperti perempuan, anak, dsb.

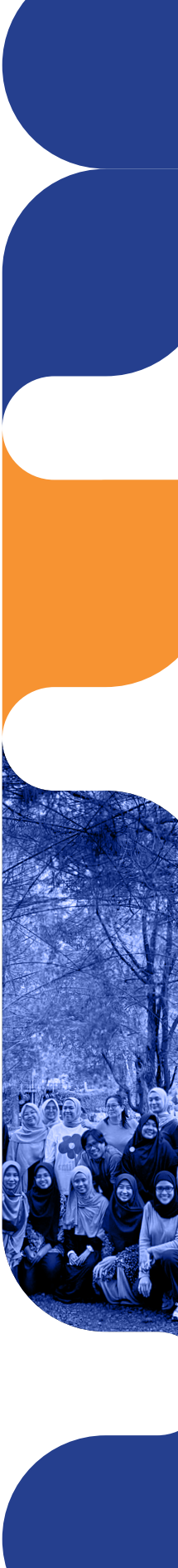
**PENGUATAN
TATA KELOLA
INTERNAL IJRS
TAHUN 2024**



1. Penguatan Kualitas dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2024, IJRS melakukan serangkaian kegiatan penguatan SDM mulai dari pengelolaan magang, rekrutmen, pelatihan hingga kegiatan peningkatan produktivitas internal yaitu sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi
Pengadaan rekrutmen anggota badan pekerja	Sepanjang tahun 2024, IJRS mengadakan kegiatan rekrutmen sebanyak dua kali untuk mengisi posisi staf keuangan dan staf umum.
Pengelolaan magang dari mahasiswa	IJRS telah membuka 2 (dua) kali kesempatan magang yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan total menerima 3 orang mahasiswa yaitu: a. Program Magang kerjasama dengan ACICIS menghadirkan dua mahasiswa Australia yaitu Madeline Bell dari Queensland University of Technology & Casey Feltham dari Griffith University) dengan periode magang selama 1 bulan; b. Program Magang internal IJRS menghadirkan satu mahasiswa Universitas Indonesia yaitu Khalifatullah Endra dari Jurusan Kriminologi dengan periode magang selama 4 bulan
Dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas	Di tahun 2024 IJRS telah memberikan kesempatan peningkatan kapasitas yang targetnya individu ataupun secara keseluruhan lembaga seperti:





Kegiatan	Deskripsi
Sesi tukar pengetahuan (<i>sharing knowledge</i>) rutin	a. Tim operasional keuangan: Pelatihan Pajak Untuk CSO. b. Tim program: Sertifikasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pelatihan Public Speaking, Pelatihan Penyusunan Catatan Kebijakan, Pelatihan <i>System Thinking</i> dengan SINERGI, Pelatihan Fasilitator untuk Paralegal Inklusif Try-out Modul Diklat Paralegal. IJRS melakukan beberapa kali kegiatan <i>sharing knowledge</i> guna tercapainya pemerataan pengetahuan di kalangan internal lembaga. Tema yang diusung diharapkan mampu menambah wawasan seluruh staf yang terlibat baik dalam hal substansi maupun hal pendukung penelitian. Adapun sesi tersebut di antaranya: a. Manajemen Birokrasi & Birokrasi Kepegawaian b. <i>Resistance in The Digital Age : Exploring Strategies to Counter State Surveillance Against Activities in Their Digital Activism a Case Study In Indonesia</i> c. <i>Cost of Crime and Criminal Justice in Drug Offenses</i> d. Diskusi pembahasan pasal - pasal bermasalah di KUHP 2023 e. Strategi Berjejaring dengan Organisasi Masyarakat Sipil. f. Diskusi Pengalaman Bekerjasama dengan K/L dan Kunci sukses bekerja bersama pemerintah sebagai pemangku kepentingan g. Diskusi tentang Menabung Saham h. Diskusi Pelaporan Administrasi dan Keuangan Program. i. Pengetahuan mengenai Kerangka Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah di Bidang Hukum.



Kegiatan

Deskripsi

Pelaksanaan rapat kerja dan *outing* lembaga

Di tahun 2024 IJRS mengadakan dua kali kegiatan *outing* guna meningkatkan kebersamaan, memperkuat hubungan antar individu anggota badan pekerja, serta meningkatkan semangat kerja hingga mendorong produktivitas dan kreativitas. Selain itu, pada tanggal 29 Februari 2024 - 1 Maret 2024 Anggota Badan Pekerja melaksanakan kegiatan Rapat Rutin Tahunan untuk mengevaluasi kinerja Lembaga selama satu tahun terakhir dan menyusun rencana kerja untuk tahun mendatang. Lalu, pada tanggal 18 - 21 September 2024 dilaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Strategis IJRS. Penyusunan Renstra memberikan arah, tujuan, dan strategi Lembaga dalam jangka waktu 5-10 tahun kedepan.

Penilaian kinerja tahunan Anggota Badan Pekerja

Pada tahun 2024, penilaian kinerja dilakukan sebanyak dua kali di mana pada Desember 2024, kompilasi hasil penilaian kinerja disampaikan sebagai dasar penentuan besaran nilai kinerja tahunan dan bonus kepada Anggota Badan Pekerja

Pelaksanaan Audit Keuangan Lembaga

IJRS telah melaksanakan audit keuangan, hal ini merupakan bagian penting dari komitmen IJRS untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dikelola dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Audit dilaksanakan dengan melibatkan tim yang profesional dan independen, yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek operasional, keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Proses audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan sumber daya IJRS sudah memenuhi standar yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang masih dapat ditingkatkan. Melalui pelaksanaan audit, IJRS berupaya memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa IJRS dikelola dengan prinsip



Kegiatan

Penyusunan buku manual /
pedoman pajak internal

Deskripsi

akuntabilitas yang tinggi, serta menjaga integritas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Hasil dari audit ini tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki proses internal, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya potensi penyimpangan yang dapat merugikan lembaga.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kelancaran pengelolaan keuangan serta pajak, tim operasional IJRS sedang menyusun buku manual Keuangan dan Pajak. Buku manual ini dirancang untuk memudahkan tim dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari dengan pedoman yang jelas dan sistematis mengenai tata kelola keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Buku manual ini mencakup berbagai prosedur dan langkah-langkah penting terkait pengelolaan keuangan, pelaporan pajak, serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota tim operasional. Hingga saat ini, buku manual ini masih terus dikembangkan dan diperbarui secara berkala agar dapat menjadi panduan yang lebih komprehensif. Harapannya buku manual ini tidak hanya berguna bagi tim operasional, tetapi juga dapat digunakan oleh tim manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan perpajakan.





2. Penguatan Tata Kelola dan Prosedur Lembaga

Sepanjang 2024, IJRS turut melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan adanya tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Adapun serangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi
Penyusunan SOP dan surat keputusan <i>safeguarding policies</i>	Sepanjang tahun 2024 Tim Internal IJRS telah menyusun dan mengesahkan beberapa peraturan internal lembaga di antaranya: a. SOP Moonlighting (Amandemen) b. SK Anti Human Trafficking c. SK Anti Terrorism d. SK Safety Travel Procedure e. SK Anti Fraud and Anti Bribery f. SK Conflict of Interest
Pelaksanaan pergantian dan inagurasi Direktur Eksekutif	Pada tanggal 5 Juli 2024 telah dilaksanakan inagurasi Direktur Eksekutif IJRS baru yaitu Arsa Ilmi Budiarti dengan masa jabatan sejak tahun 2024 sampai dengan 2029 menggantikan Adery Ardhan Saputro yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Direktur Eksekutif. Inagurasi dilakukan sekaligus bersama dengan kegiatan Refleksi Tahunan IJRS dengan mengundang para narasumber dan tamu dari perwakilan Kementerian/Lembaga, <i>Stakeholders</i> , Mitra, Organisasi Masyarakat Sipil, dan lainnya. Dengan terpilihnya Direktur Eksekutif yang baru, maka terbentuk pula struktur lembaga baru sebagai pendukung lembaga berjalan dengan baik serta sesuai visi dan misi Lembaga.



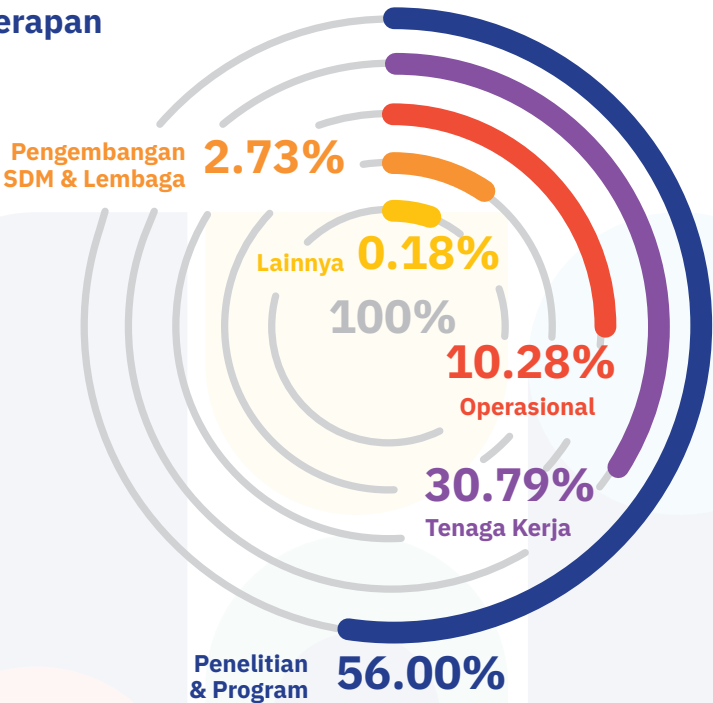
Kegiatan	Deskripsi
Realisasi investasi emas dan reksadana	Pada Maret 2024, IJRS mengalokasikan dana untuk dimasukkan ke dalam investasi berupa emas dan reksadana sebagai metode untuk menyimpan dana IJRS secara lebih produktif.

3. Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan

Selama tahun 2024, IJRS mengelola dan memperuntukkan dana sebagai berikut:



● Penyerapan



**PENGUATAN
BRANDING IJRS
TAHUN 2024**



KataHukum.id

Akses terhadap informasi hukum yang komprehensif dan mudah dipahami masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat Indonesia. Padahal, pemahaman hukum yang baik merupakan salah satu elemen kunci dalam penguatan budaya hukum. Pemahaman hukum meliputi beberapa hal yaitu kesadaran, kepatuhan, dan keterlibatan masyarakat dalam sistem hukum yang berkeadilan. Keberadaan informasi hukum yang transparan dan dapat diakses secara luas bukan hanya menjadi langkah awal dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih inklusif, tetapi juga berperan penting dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Atas upaya dalam penguatan budaya hukum tersebut, di tahun 2024 lalu IJRS menghadirkan sebuah portal data dan informasi hukum bernama **KataHukum.id**. **KataHukum.id** secara resmi diperkenalkan dalam acara perayaan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) bernama **SHElebrate x KataHukum.id** yang diselenggarakan pada 22-23 November 2024 di HeArt Space 2.0, Jakarta.

KataHukum.id dirancang untuk menjadi sumber data dan informasi bagi masyarakat dalam memperoleh wawasan hukum. **KataHukum.id** menjadi bagian dari upaya penguatan budaya hukum dengan memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses dan mudah dipahami oleh semua orang. Tidak hanya itu, kami juga tetap menjalankan strategi komunikasi melalui media sosial demi terciptanya penguatan budaya hukum.

Meskipun **KataHukum.id** sudah dalam bentuk portal data dan informasi hukum, keberadaan media sosial tetap memiliki peran yang krusial sebagai sarana penyebarluasan informasi secara lebih luas, cepat, dan interaktif. Melalui media sosial, informasi hukum dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara masif, serta membuka ruang diskusi yang lebih dinamis dan inklusif.

Kami sudah memiliki berbagai platform media komunikasi diantaranya:



[@ijrs_official](https://www.instagram.com/ijrs_official)



[@ijrs_official](https://twitter.com/ijrs_official)



[Indonesia Judicial
Research Society](https://www.linkedin.com/company/Indonesia-Judicial-Research-Society)



[@lifeatijrs](https://www.tiktok.com/@lifeatijrs)



[IJRS TV](https://www.youtube.com/IJRS_TV)



ijrs.or.id



Daftarkan email Anda ke
bit.ly/IJRS-newsletter

Dengan keberadaan berbagai macam platform tersebut, kami mencoba untuk tetap berupaya mempertahankan apa strategi komunikasi media sosial yang sudah baik dan apa saja yang perlu kami tingkatkan kembali demi memberikan wawasan hukum yang lebih relevan dengan masyarakat. Kami juga telah membuat platform media sosial khusus untuk memperkenalkan KataHukum.id dan memberikan edukasi hukum seperti apa yang ada pada fitur QnA (*Question and Answer*) di KataHukum.id, yaitu:



[@katahukum.id](https://www.instagram.com/katahukum.id)



[KataHukum.id](https://www.katahukum.id)

Meskipun kenyataannya dalam menumbuhkan budaya hukum ini memerlukan proses yang panjang, tapi kami berusaha memulai hal tersebut melalui portal informasi dan media sosial. Harapannya dengan integrasi antara portal informasi dan media sosial ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat budaya hukum.



KataHukum.id

Berlatar belakang akan sulitnya akses terhadap informasi hukum yang diperoleh oleh masyarakat, IJRS berupaya untuk menghadirkan platform portal dan informasi hukum yang menyajikan informasi dengan format yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat. Maka dari itu, IJRS menginisiasi portal **KataHukum.id** yang secara resmi diperkenalkan pada perayaan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) bernama **SHElebrate x KataHukum.id** pada 22-23 November 2024 di HeArt Space 2.0, Jakarta. **KataHukum.id** juga dimanfaatkan dan dikelola secara kolektif bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Saat ini kami berkolaborasi dengan PEKKA, Asosiasi LBH APIK Indonesia, Rumah KitaB, ICJ Makassar, Sapda Jogja dan LBH Masyarakat.

SHElebrate X KatahuKum.id 2024 yang juga menjadi ajang peluncuran KataHukum.id ini bertemakan “*Meningkatkan Kesadaran dan Kolaborasi untuk Merayakan Hak-Hak Perempuan*”. Acara ini dikemas dengan menggabungkan diskusi yang membagikan berbagai perspektif perlindungan dan penanganan perempuan yang mengalami kekerasan dan juga menghadirkan karya seni yang membawa pesan-pesan advokasi perjuangan perempuan dalam mendapatkan akses keadilan. SHElebrate X KatahuKum.id tentu saja dapat diwujudkan dengan kerja sama dari berbagai pihak yaitu dukungan dari 30+ mitra, berkolaborasi dengan 10 seniman, dan 10+ volunteer. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang aktif terlibat dalam berbagai sesi.

Pada dua hari acara ini juga terdapat 350 lebih pencarian dilakukan pada platform KataHukum.id. Upaya ini diharapkan dapat mendorong publik untuk lebih familiar dengan portal data dan informasi hukum.



Testimoni dari mitra & pengunjung SHElebrate X KatahuKum.id 2024

★★★★★



Senang bisa melakukan berbagai aktivitas yang menyuarakan hak-hak perempuan korban kekerasan, sekaligus merayakan 16 HAKTP



★★★★★

Saya bisa bertemu dengan banyak orang yang mengikuti booth, pameran, serta dapat bertukar pikiran dengan mereka



★★★★★



So much fun! Seru banget bisa kumpul sama teman teman satu frekuensi, satu visi dan satu misi

★★★★★

So grateful, bisa berpartisipasi dalam pameran SHElebrate dan bisa menyuarakan langsung isu anti kekerasan perempuan.



★★★★★



Perbanyak event-event seperti ini dengan me-ngajak visual artist. Kami senang bisa membantu menyuarakan isu-isu sosial seperti ini.

★★★★★

Acaranya keren banget! Pengisi acara di SHElebrate juga banyak menyampaikan materi yang insightful!



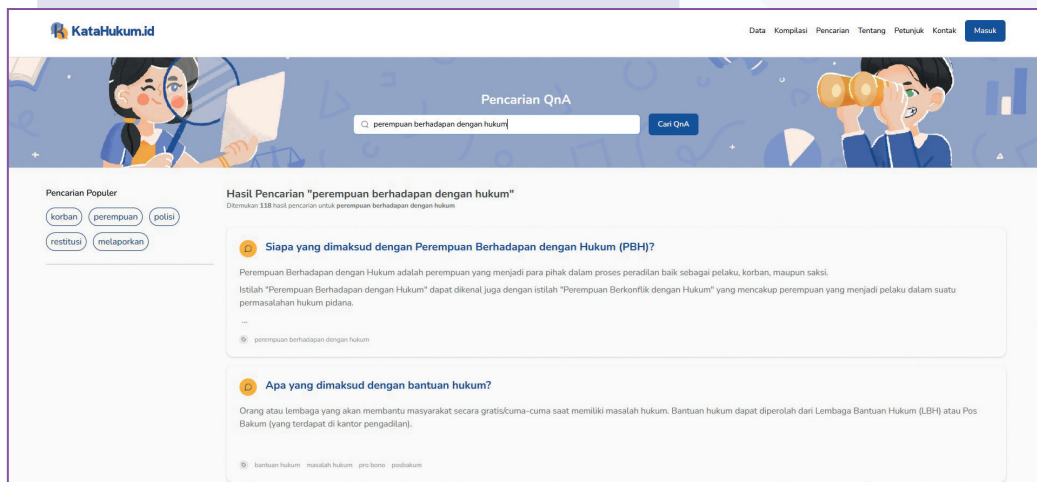


Kehadiran KataHukum.id diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai *one-stop platform* untuk memperoleh informasi hukum yang dapat diakses kapanpun di manapun oleh siapapun. Platform ini juga kami tuju untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum secara lebih terarah dan mudah dipahami dan memperluas akses data-data penelitian hukum dan sosial baik kuantitatif maupun kualitatif.

KataHukum.id memiliki beberapa fitur utama yaitu:



Pencarian jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Q&A)



Pencarian Q&A adalah fitur yang dapat digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan! Selain pertanyaan, pengguna KataHukum juga bisa menuliskan kata kunci yang dicari di kolom pencarian.



Visualisasi data-data berdasarkan hasil penelitian

Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019

Penelitian melihat kebutuhan hukum pada masyarakat Indonesia menjadi sangat penting – untuk memetakan secara menyeluruh mengenai permasalahan hukum apa saja yang sering dihadapi masyarakat. Dengan demikian, penyusun kebijakan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena kebijakan yang nantinya dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehingga komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak dan akses keadilan bagi masyarakat dapat meningkat dengan adanya data tersebut.



Mayoritas Pasif

terhadap permasalahan yang dialami

>50%

menganggap permasalahan yang dialami kurang signifikan

Mayoritas Memilih Keluarga

sebagai pihak untuk mendampingi proses penyelesaian

Fitur Visualisasi Data berisikan data-data hasil penelitian hukum dari kami dan juga mitra KataHukum.id. Untuk melihat fakta-fakta yang terjadi dan fenomena sosial-hukum secara lebih menarik. Harapannya data yang tersedia dapat mendorong reformasi kebijakan berbasis data.



Penyajian kompilasi informasi terarah secara tematis

[Data](#)
[Kompilasi](#)
[Pencarian](#)
[Tentang](#)
[Penjuruk](#)
[Kontak](#)
[Menu](#)

Kompilasi

Kompilasi merupakan kumpulan yang-jawab yang berkaitan dengan tema atau isu tertentu. Kompilasi mempermudah pencarian informasi hukum lebih mendalam mengenai topik tertentu yang kamu butuhkan. Silakan jelajahi kompilasi KataHukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Kompilasi Kami

Ketidakadilan Gender

Informasi mengenai ketidakadilan gender dapat Anda temukan di dalam kompilasi ini

Alur Proses Hukum

Penjelasan mengenai alur proses hukum dapat Anda temukan dalam kompilasi berikut ini

Kompensasi (Ganti Rugi oleh Negara)

Anda dapat mempelajari informasi mengenai ganti rugi yang diberikan oleh negara dengan menelusuri pilihan pertanyaan dalam kompilasi berikut ini

Fitur Kompilasi berisikan kumpulan informasi tentang tema atau isu tertentu.



Statistik website KataHukum.id per 23 November - 31 Desember 2024

Telah diakses oleh sebanyak

234 akun pengguna

Telah diakses sebanyak

1.039 kali

Media Sosial

Penggunaan media sosial tetap menjadi salah satu strategi komunikasi yang efektif dan interaktif dalam menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Dalam hitungan menit, pesan yang disampaikan dapat menjangkau pengguna media sosial yang lebih besar, memungkinkan distribusi informasi hukum secara lebih efisien. Beragam fitur interaktif yang tersedia, seperti *Direct Message (DM)*, kolom komentar, serta fitur Q&A di *Instagram Story*, memberikan ruang bagi pengguna media sosial untuk berpartisipasi aktif, berdiskusi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai bagian dari upaya penguatan budaya hukum, kami telah mengoptimalkan media sosial sebagai sarana edukasi, sekaligus mengukur tingkat keterlibatan serta ketertarikan pengguna media sosial terhadap berbagai konten edukasi yang kami sebarluaskan.

Konten Media Sosial

Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Disparitas pemidanaan di Indonesia terlihat saat dua orang melakukan tindak pidana serupa, tetapi vonisnya berbeda. Meskipun tidak semua disparitas buruk, masalah muncul saat perbedaan hukuman sangat jauh, sering kali disebabkan oleh bias atau prasangka hakim. Kami meneliti kasus perkosaan dan pencabulan terhadap anak dan orang dewasa di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dari 2019 hingga 2021, menggunakan pendekatan kuantitatif dan yuridis normatif. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor-faktor tidak relevan kerap mempengaruhi keputusan hakim dan mengarah pada disparitas yang tidak adil. Dalam peluncuran hasil riset ini, kami berkolaborasi dengan media **The Conversation** untuk mengemas ulang hasil riset kami menjadi sebuah artikel singkat serta video penjelasan (*explainer video*) agar temuan-temuan dalam hasil riset ini mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dari berbagai konten produksi mandiri dan kolaborasi di isu disparitas pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual yang sudah kami produksi seperti rilis media, artikel, infografis, carousel, dan video *explainer*, menghasilkan *engagement* sebanyak

8.900 jangkauan

553 likes

107 saves

89 shares

rata-rata *engagement*
rate sebesar

0.11



Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia



Pada 14 Februari 2024 lalu, Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), dimana salah satu agendanya adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, selama masa kampanye, isu keterbukaan pemerintah Indonesia masih belum menjadi pusat perhatian bagi publik. Komitmen pelaksanaan keterbukaan pemerintah Indonesia seharusnya menjadi agenda penting untuk dilaksanakan pemerintahan pada masa sekarang dan ditindaklanjuti oleh pemerintahan pada masa yang akan datang. Terlebih lagi komitmen ini dibutuhkan dalam mengawal nilai-nilai keterbukaan pemerintah agar terus transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif. **Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia yang terdiri dari 18 (delapan belas) Organisasi Masyarakat Sipil** termasuk kami, menyuarakan keresahan kami akan keterbukaan pemerintah/*open government* ini dengan pendekatan berupa diskusi publik dan rilis media. Dari konten-konten diskusi dan rilis media ini jumlah keterlibatan atau *engagement* pengguna media sosial di *Instagram* adalah sebesar

4.773 jangkauan

258 likes

33 saves

38 shares

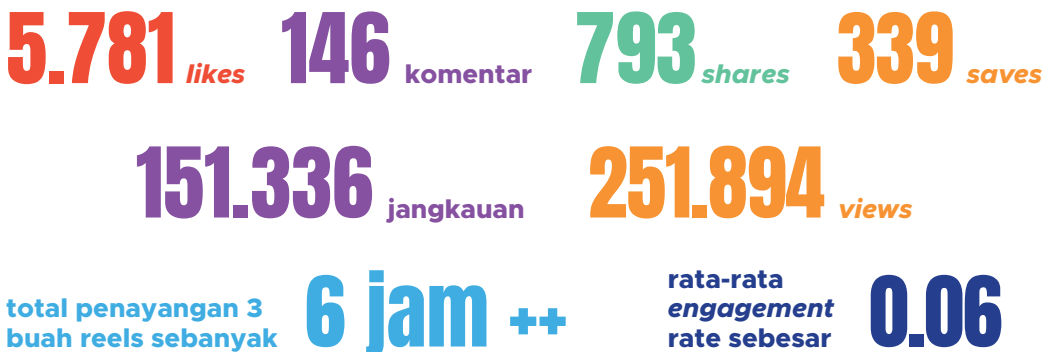
rata-rata *engagement*
rate sebesar

0.06

SHElebrate X KataHukum.id



Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP), dilangsungkan mini festival **SHElebrate X KataHukum.id** di Heart Space 2.0. Acara yang dihelat pada 22-23 November 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Generasi Milenial dan Gen Z, tentang hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bagian dari peringatan 16 HAKTP, SHElebrate X KataHukum.id bertujuan untuk menciptakan ruang refleksi, edukasi, dan kolaborasi yang mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam mini festival ini juga diluncurkan sebuah platform data dan informasi hukum untuk semua kalangan masyarakat bernama **KataHukum.id**. Kegiatan **SHElebrate x KataHukum.id** ini menghasilkan sejumlah 50+ konten mulai dari teaser hingga konten liputan pasca acara. Dari 50+ konten tersebut menghasilkan



Semua hasil *engagement* tersebut kami lakukan secara **organik tanpa iklan/ads**. Hal ini tentunya bisa terwujud karena adanya kolaborasi yang raya antara **30+ mitra penyelenggara SHElebrate x KataHukum.id**

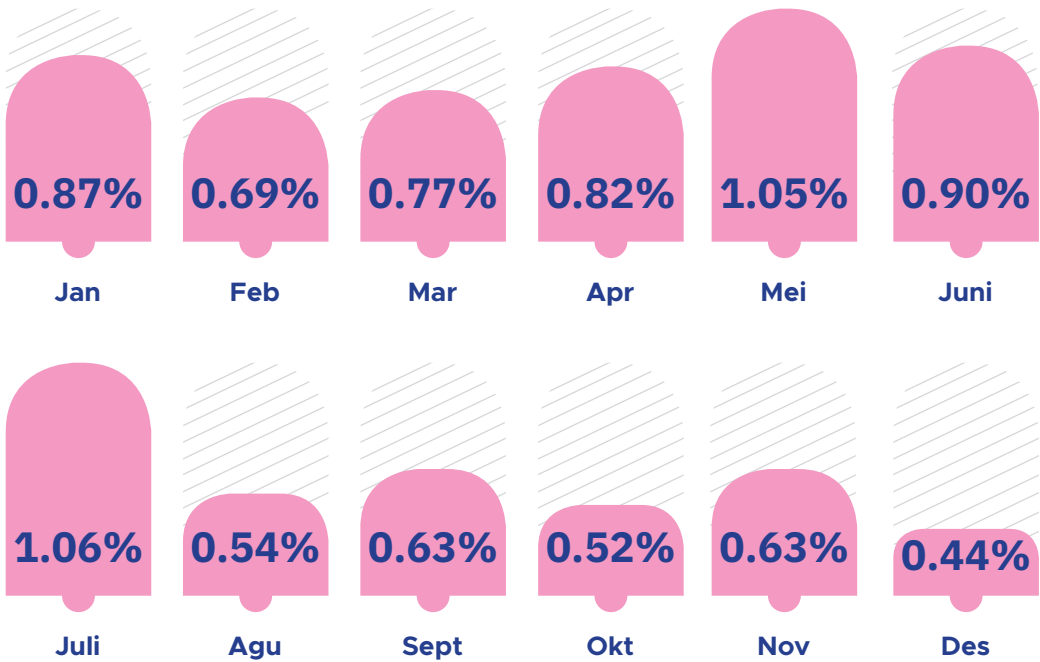


Engagement Media Sosial

Instagram

Demografi Followers (per 7 Januari 2025)	
Jumlah followers mencapai 6.955 orang	Usia followers tertinggi ditempati oleh kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebanyak 49.4%
Persentase followers, laki-laki 58.9% perempuan 41%	Lokasi pengikut terbanyak adalah berada di Jakarta yaitu sebanyak 33.8%

Engagement Rate (1 Januari - 31 Desember 2024)





Akun instagram IJRS merupakan salah satu platform sosial media utama yang IJRS gunakan untuk menyebarkan informasi sekaligus sebagai sarana edukasi. Sasaran utama akun instagram IJRS adalah generasi muda yaitu Gen Millennial dan juga Gen Z. Hal ini dapat terlihat dari demografi usia followers akun instagram IJRS paling banyak ditempati oleh kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebanyak 49,4%.

Bulan Mei dan Juli menjadi bulan dengan engagement rate tertinggi. Di bulan Mei, kami memiliki momentum yang cukup penting yaitu adanya transisi kepemimpinan dengan diangkatnya direktur eksekutif baru. Pada bulan Juli dengan perolehan engagement rate dengan selisih 0,1% lebih tinggi dari bulan Mei, kami memiliki dua event yang juga menarik banyak atensi yaitu Diseminasi Publikasi IJRS: Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023 & Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika. Melihat data tersebut, dapat terlihat engagement rate tertinggi terjadi ketika terdapat informasi dan momentum yang penting. Kami pernah membuat survei ke pengguna media sosial kami, dimana salah satu hasilnya menyebutkan bahwa memang pengguna media sosial kami lebih tertarik berinteraksi dengan konten yang memiliki pembahasan topik-topik krusial. Kemungkinan hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan engagement rate kami di bulan Mei dan Juli ini tinggi.

 Tiktok

Demografi Followers (per 7 Januari 2025)	
Jumlah followers mencapai 202 orang	Usia followers tertinggi ditempati oleh kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebanyak 47.1%
Persentase followers, laki-laki 46% perempuan 54%	

Demografi Viewers (per 7 Januari 2025)	
Jumlah viewers mencapai lebih dari 17.000*	Usia viewers tertinggi ditempati oleh kelompok umur 25-34 tahun yaitu sebanyak 53.4% . Dengan selisih yang sedikit yaitu 52.7% , posisi kedua ditempati oleh kelompok umur 18-24 tahun.
Persentase followers, laki-laki 40% perempuan 60%	

**penarikan data per 7 Januari 2025*

**Engagement Rate (per 7 Januari 2025)**

Jumlah konten yang dibuat sebanyak

26

Total views adalah

17.000**5 konten Paling Banyak Dilihat**

Video teaser SHElebrate x KataHukum.id 2024



Kampanye IWD 2024



Realita Intern



A Day in My Life: Intern IJRS



Seminar Hukum Acara Pidana Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir ini, TikTok menjadi salah satu platform sosial media yang menjadi fokus kami. Berbeda dengan sosial media IJRS yang lain, kami mencoba mengemas konten-konten TikTok IJRS dengan cara yang lebih ringan dan *fun*. Selain itu, kami juga berusaha memodifikasi konten tersebut dengan tren-tren yang sedang disukai. Hal ini kami lakukan dengan tujuan agar lebih dekat dan mudah diterima oleh pengguna media sosial yang kami targetkan yaitu *Gen Z*. Maka dari itu, konten-konten yang kami publikasikan adalah seputar budaya kerja, kegiatan, dan keseharian kami sebagai anak NGO yang dikemas dengan menyenangkan. Konten TikTok IJRS juga diisi oleh *talent* kami yaitu dari anggota peneliti, staf admin-keuangan, dan staf *knowledge management* kami yang notabene masih berusia muda.

Fokus untuk mengembangkan platform ini membuat kami terus berkomitmen untuk secara rutin memproduksi konten-konten yang informatif dan menyenangkan.



● LinkedIn

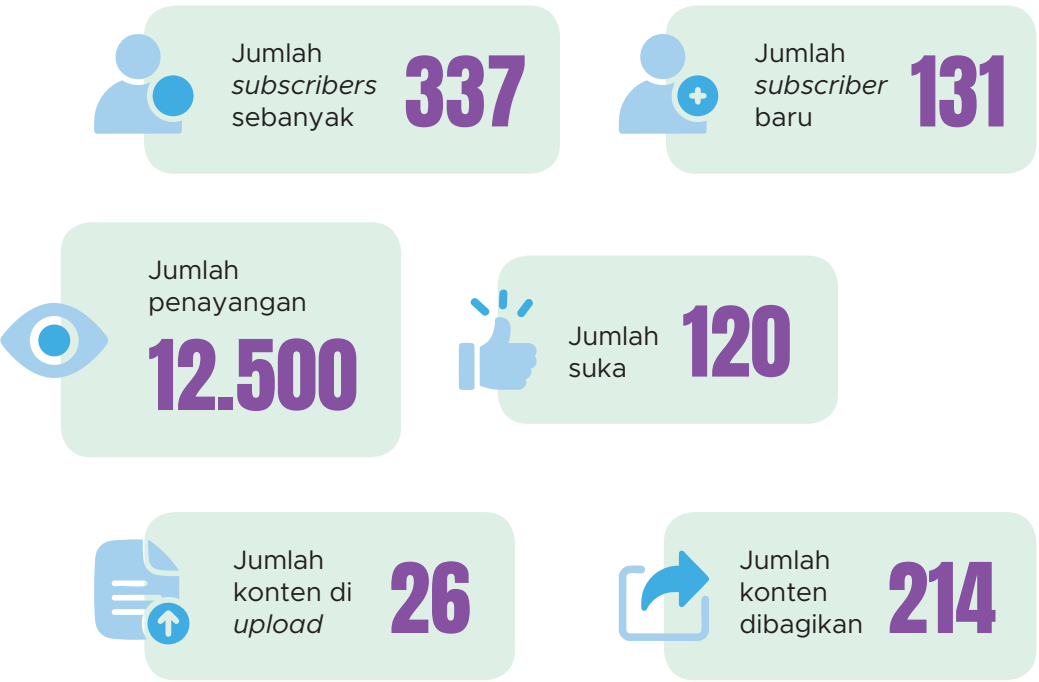
Demografi pengikut per 4 Maret - 31 Desember 2024	
Jumlah pengikut sebanyak 729	Jumlah pengikut baru selama 1 tahun kebelakang sebanyak 230
Demografi pengunjung per 4 Maret - 31 Desember 2024	
Jumlah kunjungan halaman sebanyak 1.144	Kategori Perangkat Pengunjung. 850 menggunakan ponsel 294 pengunjung desktop
Highlight Engagement per 4 Maret - 31 Desember 2024	
Jumlah <i>impressions</i> post* sebanyak 28.146	Jumlah <i>reactions</i> sebanyak 430
	Jumlah <i>engagement rate</i> 7.40% . Engagement rate tertinggi pada bulan September yaitu 2.89%

*Frekuensi konten tampil di layar pengguna media sosial.

Linkedin juga merupakan salah satu platform sosial media yang kami gunakan untuk menyebarkan informasi-informasi seputar kegiatan kami dan produk pengetahuan yang kami hasilkan. Kami memanfaatkan linkedin bukan hanya sebagai *institutional branding* namun sebagai platform untuk *personal branding* bagi anggota kami. Maka dari itu, *tone of voice* dan konten yang kami unggah di linkedin pun cenderung lebih formal dibandingkan dengan platform sosial media kami yang lain. Tentu saja masih terdapat banyak ruang bagi kami untuk belajar dalam mengemas konten-konten tersebut agar kedepannya lebih tepat sasaran dan memiliki jangkauan yang lebih luas lagi.



● Youtube



● Website

Jumlah Pengunjung & Kunjungan	
Jumlah pengunjung baru 82.155	Jumlah kunjungan 82.235

Sumber Utama Kunjungan ke Website	
96.626	kunjungan <i>organic</i> . Kunjungan <i>organic</i> berarti kunjungan yang dilakukan dengan mengetikkan suatu kata kunci, kemudian website IJRS berada di <i>top search</i> lalu di klik oleh <i>viewers</i> .

**11.617**

kunjungan *direct*. Kunjungan *direct* terjadi ketika *viewers* mengetik langsung alamat web ijrs.or.id pada *search engine* yang mereka gunakan.

1.514

referral. Kunjungan *referral* ini artinya adalah *viewers* mengunjungi web IJRS melalui link-link yang telah dibagikan.

Kategori Perangkat Pengunjung

**69.6%***handphone***29.7%***desktop***0.7%***tablet*

Tiga Halaman yang Paling Sering dikunjungi



[Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius](#)

16.116

viewers



[Pakar Menjawab: Alasan Mengapa Hukuman Mati tidak Efektif dan Harus Dihentikan](#)

12.627

viewers



[Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia](#)

12.087

viewers

Media Massa

Reformasi sistem peradilan pidana dan kebijakan hukum

THE CONVERSATION

Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik

Ekonomi

Isu Anak Muda

Kesehatan

Lingkungan

Pendidikan + Budaya

Politik + Masyarakat

Sains + Teknologi

Podcast



Rapor merah reformasi hukum peradilan pidana Jokowi, PR untuk Prabowo

Ulasan: September 21, 2024 2.22pm WIB



Prabowo-Gibran yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi akan bekerja mulai 20 Oktober 2024.

Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo yang memuat isu-isu penting hasil penetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya.

Penulis



Dio Ashar Wicaksana
PhD Student, Australian National University



Gladys Nadya Arianto
Researcher, Indonesia Judicial Research Society



Putri K. Amanda



BANDUNGBERGERAK

bercerita dari pinggir

INDONESIA / MENGKHAWATIRKAN MENINGKATKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA, KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENOLAK REVISI RUU POLRI

Mengkhawatirkan Meningkatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Revisi RUU Polri

Kekerasan yang dilakukan anggota Polri selama ini banyak menjadi sorotan publik. RUU Polri akan meningkatkan kewenangan berlebihan.



Penulis **Muhammad Akmal Firmansyah** 24 Juni 2024

BandungBergerak.id - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menyoroti Rancangan Undang Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) sebagai usul inisiatif DPR. RUU ini dinilai akan menjadikan kepolisian memiliki kewenangan ekstra.

“Berdasarkan rancangan (*draft*) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugul-ugalan (*excessive*) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “*superbody*,”” demikian pernyataan resmi Koalisi Masyarakat Sipil, diaksen Senin, 24 Juni 2024.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari AJAR (Asia Justice and Rights), AJI Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen), Amnesty Internasional Indonesia, ELSAM, HRWG (Human Rights Working Group), ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), ICW (Indonesia Corruption Watch), IJRS (Indonesia Judicial Research Society), IM57+ Institute, Imparsial, KontraS, Kurawal Foundation, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LeP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan), PBHI Nasional, PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), SAFEnet, Themis Indonesia, TII (Transparansi Internasional Indonesia), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).



Perlindungan terhadap kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

THE CONVERSATION

Creeping Imah, gaya jurnalistik

Ekonomi | Isu Anak Muda | Kesehatan | Lingkungan | Pendidikan + Budaya | **Politik + Masyarakat** | Sains + Teknologi | Podcast

In English

Disparitas pemidanaan: mengapa pelaku kekerasan seksual bisa mendapat hukuman berbeda-beda untuk kasus serupa?

Dibebaskan: Maret 27, 2024 10:38am WIB

Rutawi korban kekerasan seksual. Tinekam jomang/Shutterstock

Temuan penelitian

Untuk tindak pidana perkosaan, dari 350 putusan yang terdiri dari 368 terdakwa, diperoleh 33 (tiga puluh tiga) kategori karakteristik yang serupa. Sedangkan pada tindak pidana pencabulan, dari 303 putusan yang terdiri dari 307 terdakwa, diperoleh 18 (delapan belas) kategori karakteristik yang serupa.

Variabelnya terdiri atas jumlah korban, status disabilitas korban, usia korban, kondisi ketidakberdayaan korban, cara melakukan tindak pidana, status terdakwa sebagai orang yang dipercayakan untuk mengurus korban, tindak pidana yang diawali dengan ancaman atau tidak serta dampak terhadap korban.

Penulis

 **Arianda Lastiur Paulina**
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society

 **Siti Ismayra**
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society

MAGDALENE

Supporting diversity, empowering women

Home | Issues | Safe Space | Lifestyle | Culture | People We

Community Update

SHElebrate X KataHukum: Perempuan Berhadapan dengan Hukum Punya Hak yang Sama

SHElebrate X KataHukum.id membicarakan hak-hak perempuan di depan hukum dalam rangka meramalkan kampanye 16HAKTP.

 **Magdalene**
December 12, 2024 • 2 min read • 1422 Views



Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP), dilaksanakan mini festival SHElebrate X KataHukum.id di Heart Space 2.0. Acara yang dihelat pada 22-23 November 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Generasi Milenial dan Gen Z, tentang hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ini selaras dengan cita-cita mewujudkan perlindungan dan akses keadilan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

"Sebagai bagian dari peringatan 16 HAKTP, SHElebrate X KataHukum.id bertujuan untuk menciptakan ruang refleksi, edukasi, dan kolaborasi yang mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan," tulis penyelenggara dalam rilis resmi yang diterima **Magdalene**.

"Kami mengundang lebih 40 CSO nasional dan internasional untuk berpartisipasi dalam HLF MSP, di antaranya Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Migrant Care, Wahana Visi Indonesia (WVI), United Cities for Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan banyak lagi yang berkaitan erat dengan upaya pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, di Jakarta, Senin.

MITRA IJRS 2024





LAMPIRAN

**Narasumber, Pembicara,
Moderator, Fasilitator, dsb.**

1. Narasumber di acara peluncuran Penelitian Perubahan Hukum Acara Pidana Pasca KUHP 2023 - Matheus
2. Narasumber di acara Judicial Symposium on Terrorism Eradication yang diselenggarakan oleh JCLEC - Matheus
3. Moderator Dialog Kebijakan: Reformasi Kebijakan Narkotika dan Penerapan Harm Reduction di Indonesia (Sesi 1) - Matheus
4. Narasumber pembahasan dan penyusunan renstra Komnas HAM 2025-2029 - Marselino
5. Narasumber Diskusi Kelompok Expert untuk penyusunan Teknokratik Renstra LPSK 2025-2029 dan penyusunan Indeks Perlindungan Saksi dan Korban yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - Marselino
6. Co-fasilitator pelatihan bagi OBH di Padang terkait pemberian bankum bagi kelompok rentan berdasarkan Starla - Marselino
7. Narasumber SHELebrate x Katahukum.id - Marsha
8. Narasumber Diskusi Daring "Urgensi Kolaborasi dalam Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum" Dalam Rangka Indonesia Open Government Week 2024 - Marsha
9. Pembicara Indonesian Institute tentang UUT PKS - Marsha
10. Co-fasilitator Pelatihan CBDB-TAF - Pelatihan Advokat - Marsha
11. Co-fasilitator Materi Pelatihan untuk Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum- Marsha
12. Narasumber OGP Summit - Arsa
13. Narasumber Indeks HAM - Arsa
14. Narasumber AIPJ2 Podcast - Arsa
15. Narasumber di The 6th Iclave at FHUI - Aditya
16. Pembicara dalam Seminar Hukum Pidana oleh ASPERHUPIKI - Aditya
17. Pembicara dalam Diseminasi Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP - Aditya
18. Pembicara dalam Diseminasi Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika - Aditya
19. Pemateri dalam sosialisasi KUHP 2023 di Kejaksaan wilayah hukum Bangka Belitung (5x pertemuan) - Aditya
20. Pemateri dalam Sosialisasi KUHP 2023 di Kejaksaan wilayah hukum DKJ (8x pertemuan) - Aditya
21. Pemateri dalam kelas Tindak Pidana Korporasi STIH Adhyaksa - Aditya
22. Narasumber wawancara bersama WJP - Aditya
23. Narasumber Sesi Capacity Building pada Agenda Regional Paralegal Exchange (ALG) di Bangkok, Thailand - Aisyah
24. Narasumber pada side event High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership terkait Innovative Financing to Accelerating SDGs 16 in Indonesia - Aisyah
25. Pemapar hasil riset pada diseminasi kajian Kajian Pemantauan dan Evaluasi Terkait Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (AIPJ2) - Aisyah
26. Narasumber Webinar Bahaya Perkawinan Anak menurut UU TPKS - Aisyah
27. Narasumber diskusi X (Twitter) Space SINDIKASI terkait UU Anti Diskriminasi - Aisyah



28. Moderator Talkshow SHElebrate: Suara, Harapan dan Perubahan: Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual - Aisyah
29. Co-fasilitator Lokakarya Pemberdayaan Hukum sebagai Metode Penguatan Peran Paralegal dalam Upaya Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan UU TPKS - Aisyah
30. Co - Facilitator Pelaksanaan In-Country Paralegal Exchange (Alternative Law Groups) - Aisyah
31. Penanggap pada consultative meeting Policy Paper INFID "Dispensasi Kawin Usia Anak Bagi Perlindungan Anak" - Aisyah
32. Pemapar hasil penelitian di diseminasi Kajian Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum Tentang Keadilan Restoratif Terhadap KUHP 2023 (UNODC) - Aisyah
33. Narasumber kegiatan lokakarya KAIN untuk mendorong advokasi RUU Penghapusan Diskriminasi ke Prolegnas - Aisyah
34. Co-Narasumber untuk menyampaikan materi di kelas perkuliahan Kriminologi FISIP UI terkait penghapusan diskriminasi - Aisyah
35. Moderator diskusi publik "Urgensi Komitmen Ko-Kreasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum" - Aisyah
36. Pembicara pada Panel 2 di "1st International Conference on Drugs Research and Policy 2024." dengan judul makalah/jurnal "The Urgency of Restructuring the Criminal Provisions of the Indonesia Narcotics Law 35/2009" - Siti Ismaya
37. Narasumber pada Webinar Diseminasi Penelitian tentang "Disparitas Pidana: Menyoroti Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual" - Siti Ismaya
38. Moderator dalam sharing session tentang "Plan Career" di Yayasan Beasiswa Assegaf - Siti Ismaya
39. Narasumber diseminasi penelitian "Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta" - Siti Ismaya
40. Narasumber Lokakarya Pemberdayaan Hukum IJRS - LBH APIK Jakarta (In Country Paralegal Exchange) - Siti Ismaya
41. Narasumber pada Seminar Hukum Acara Pidana Nasional dengan materi berjudul "Peran Advokat dalam Penanganan TPKS" - Siti Ismaya
42. Narasumber pada Sosialisasi KUHP 2023 dengan materi gugurnya kewenangan penuntutan jaksa - Siti Ismaya
43. Fasilitator pada Lokakarya Pemberdayaan Hukum IJRS - LBH APIK Jakarta (In Country Paralegal Exchange) - Siti Ismaya
44. Fasilitator pada Pemberdayaan Hukum di Desa Jangkar: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan - Siti Ismaya
45. Moderator diskusi Live IG "Femisida di Indonesia: Realita, Tantangan, dan Solusi" - Siti Ismaya
46. Moderator diskusi Live IG "Perkawinan Anak dalam Perspektif Agama: Mendorong Peran Pemuka Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak" - Siti Ismaya
47. MC pada Pemberdayaan Hukum di Desa Jangkar: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan - Siti Ismaya
48. MC pada pada Pelatihan Organisasi Advokat tentang UU TPKS pada 28-30 Agustus 2024 di Hotel Aston, Makassar. - Siti Ismaya
49. MC pada pada Pelatihan Organisasi Advokat tentang UU TPKS pada 18 Juli 2024 bertempat di PERADI Tower - Siti Ismaya



50. MC pada pada Pelatihan Organisasi Advokat tentang UU TPKS pada 26-28 Juni 2024 bertempat di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta. - Siti Ismaya
51. Co-fasilitator pada Pelatihan Organisasi Advokat tentang UU TPKS pada 26-28 Juni 2024 bertempat di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta. - Siti Ismaya
52. Co-fasilitator pada Pelatihan Organisasi Advokat tentang UU TPKS pada 18 Juli 2024 bertempat di PERADI Tower - Siti Ismaya
53. Co-fasilitator pada Pelatihan Organisasi Advokat tentang UU TPKS pada 28-30 Agustus 2024 di Hotel Aston, Makassar. - Siti Ismaya
54. Narasumber Diseminasi IPH 2022 - Bunga Pertiwi
55. Fasilitator Pelatihan UU TPKS bagi Advokat CBDB - Bunga Pertiwi
56. Narasumber OG Week 2024 - Gladys Nadya
57. Narasumber/Pemapar Launching IPH 2022 - Gladys Nadya
58. Fasilitator Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi OBH terhadap Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum - Gladys Nadya
59. Moderator Workshop RUU Bantuan Hukum yang diadakan oleh LBH APIK - Gladys Nadya
60. Moderator Workshop Lanjutan RUU Bankum yang diadakan oleh YLBHI - Gladys Nadya
61. Fasilitator Pelatihan UU TPKS bagi Advokat CBDB - Gladys Nadya
62. Pembicara di Side Event HLF MSP terkait Penelitian Cost of Crime - Gladys Nadya
63. Pembicara di Workshop Criminal Statistic Data - Gladys Nadya
64. Pembicara Pemapar Diseminasi Hasil Monev Perma 3 2017 dan Perma 5 2019 di Kick Off Meeting Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung - Gladys Nadya
65. Narasumber di Launching Riset Kawin Anak Koalisi 18+ dan Wahana Visi Indonesia - Gladys
66. Fasilitator Workshop Paralegal ALG - Gladys Nadya
67. Fasilitator Pemberdayaan Hukum LEF - Gladys Nadya
68. Fasilitator Pelatihan Briefing Enumerator Indeks Pembangunan Hukum (IPH) - Gladys Nadya
69. Fasilitator Verifikasi data administrasi Indeks Pembangunan Hukum - Gladys Nadya
70. Fasilitator Bimtek Indeks IPH - Gladys
71. Moderator di Refleksi 5 Tahun IJRS Inaugurasi IJRS - Gladys Nadya
72. Co Fasil Bimtek Indeks HAM - Gladys Nadya
73. Konferensi internasional ICDR narkoba cost of crime and criminal justice - Saffah Salisa
74. Diskusi publik PLAN Indonesia berjudul "Pentingnya Kesadaran Komunitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual" - Saffah Salisa
75. Diskusi publik PLAN Indonesia berjudul "Pentingnya Kesadaran Komunitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual" - Saffah Salisa
76. Fasilitator Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum (IJRS) Desember 2023 - Saffah Salisa
77. Moderator Seminar Nasional Kejaksaan RI terkait Tindak Pidana Khusus: Pencucian Uang Tahun 2024 - Saffah Salisa
78. Co-fasilitator konsultasi publik masukan naskah akademik RUU Penghapusan Diskriminasi (IJRS-CRM) Oktober 2023 - Saffah Salisa
79. Pembicara pada diskusi publik "Urgensi RUU Penghapusan Diskriminasi: Akselerasi Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia" pemaparan dari Naskah Akademik RUU Anti-Diskriminasi,



- diselenggarakan oleh PBHI (23 Juli 2024)- Saffah Salisa
80. Pembicara pada "Diskusi Publik Online: Peran Pemuka Agama dalam Eliminasi Stigma & Diskriminasi HIV dengan Mendorong RUU Penghapusan Diskriminasi Komprehensif", pemaparan dari Naskah Akademik RUU Anti-Diskriminasi, diselenggarakan oleh YIFOS (30 Oktober 2024) - Saffah Salisa
 81. Pemapar hasil penelitian Cost of Crime - AIPJ (4 December 2024) - Saffah Salisa
 82. Pemaparan hasil penelitian "Asesmen Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 tentang Akses Keadilan Perempuan Berhadapan dengan Hukum" - AIPJ2 (2 Desember 2024) - Saffah Salisa
 83. Pembicara dalam workshop yang diselenggarakan CWI/KAIN, paparan kajian pendahuluan urgensi ruu anti-diskriminasi (25 Juni 2024) - Saffah Salisa
 84. Pembicara/narasumber/pemberi materi pada Sosialisasi KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (24 April 2024) - Saffah Salisa
 85. Pembicara/narasumber/pemberi materi pada Sosialisasi KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (6 Mei 2024) - Saffah Salisa
 86. Pembicara/narasumber/pemberi materi pada Sosialisasi KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (8 Mei 2024) - Saffah Salisa
 87. Pembicara/narasumber/pemberi materi pada Sosialisasi KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (14 Mei 2024) - Saffah Salisa
 88. Pembicara/narasumber/pemberi materi pada Sosialisasi KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (28 Mei 2024) - Saffah Salisa
 89. Pembicara/narasumber/pemberi materi pada Sosialisasi KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (4 Juni 2024) - Saffah Salisa
 90. Moderator diskusi publik LBH APIK dalam launching rancangan peraturan kepolisian RI tentang perempuan berhadapan dengan hukum (19 November 2024) - Saffah Salisa
 91. Co-fasil pelatihan advokat UU TPKS - TAF-CBDB (28-31 Juni 2024) - Saffah Salisa
 92. Co-fasilitator Pelatihan UU TPKS Makassar - Alexander Tanri
 93. Narasumber Pelatihan kejaksaan Bangka Belitung - Alexander Tanri
 94. Pembicara *Research Cost of justice* - Alexander Tanri
 95. Narasumber Pelatihan UU TPKS Advokat (PERADI RBA & PERADI SAI) - Andreas Nathaniel
 96. Fasilitator - Diklat RJ Kejaksaan Januari dan Maret - [Andreas Marbun](#)
 97. Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian Monitoring dan Evaluasi Pedoman 11/2021 tentang Narkotika di lingkungan Kejaksaan Agung - [Andreas Marbun](#)
 98. Fasilitator Pelatihan PERADI SOHO TPKS dan Makassar - Arianda Lastiur P
 99. Fasilitator Bangkok Paralegal Gender Session - Arianda Lastiur P
 100. Fasilitator Lokakarya Pemberdayaan Hukum sebagai Metode Penguatan Peran Paralegal dalam Upaya Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Arianda Lastiur P
 101. Fasilitator [ALG] In-Country Paralegal Exchange - Arianda Lastiur P
 102. Fasilitator Rapat Evaluasi Mekanisme RAN OGI bersama CSO OGP Indonesia - Arianda Lastiur P
 103. Fasilitator Rapat Usulan Mekanisme Penyusunan RAN OGI VIII bersama CSO Indonesia - Arianda Lastiur P
 104. Narasumber Sosiasiasi KUHP 2023 tentang TPKS kepada Kejati Babel - Arianda Lastiur P



105. Narasumber CRM - Arianda Lastiur P
106. Narasumber Shelebrate (Talkshow Bersama Melawan KS bersama TC ID) - Arianda Lastiur P
107. Narasumber Paparan Hasil Penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengenai Kajian Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 Terhadap Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kick Off Meeting Pokja Perempuan MA RI - Arianda Lastiur P
108. Narasumber Diseminasi Hasil Penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengenai Kajian Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 Terhadap Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kejaksaan Agung - Arianda Lastiur P
109. Narasumber Bangkok Regional Paralegal Exchange - Arianda Lastiur P
110. Co-Fasilitator di Internalisasi Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia (saat sesi Studi Kasus hari ke 2 Internalisasi) - Arianda Lastiur P
111. Co-Fasilitator Pelatihan Organisasi Bantuan Hukum di Kalimantan Timur (Samarinda) terkait dengan Starla Bantuan Hukum - Sesi LBH APIK dan PBHI - Arianda Lastiur P
112. Fasilitator Ice Breaking di ASPAC PLE (Bandung) - Arianda Lastiur P
113. Fasilitator Pelatihan Organisasi Bantuan Hukum di Kalimantan Timur (Samarinda) terkait dengan Starla Bantuan Hukum - Sesi Perkenalan dan Sesi Keadilan Restoratif - Arianda Lastiur P
114. Narasumber wawancara "interview on the Significance of Bangkok General Guidance and Perma 3/2017" bersama ICJ - Arianda Lastiur P
115. Narasumber/penanggap di Sosialisasi KUHP 2023 di Kejaksaan se DKI Jakarta (Pasal 341 – 360 dan Pasal 461 – 480 Rabu 12 Juni 2024) - Arianda Lastiur
116. Narasumber/penanggap dari Sosialisasi KUHP 2023 di Kejaksaan se DKI Jakarta (Pasal 81-100 Hari Kamis 30 Mei 2024) - Arianda Lastiur P
117. Narasumber/penanggap di Sosialisasi KUHP 2023 di Kejaksaan se DKI Jakarta (Pasal 281 – 300 dan Pasal 401 – 420 Hari Senin 20 Mei 2024) - Arianda Lastiur P
118. Narasumber/penanggap di Sosialisasi KUHP 2023 di Kejaksaan se DKI Jakarta (Pasal 141-160 Hari Kamis 2 Mei 2024) - Arianda Lastiur P
119. Narasumber tentang Open Government Indonesia dalam kegiatan Dagri 6 Juni 2024 - Arianda Lastiur P
120. Moderator ASPAC - Gregorius Yoseph Laba
121. Moderator dalam diseminasi hasil penelitian "Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" - Gregorius Yoseph Laba
122. Moderator dalam diskusi publik "Pemilu 2024: Arah Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Indonesia" - Gregorius Yoseph Laba
123. Moderator dalam diskusi publik Open Government Week: "Arah Kebijakan Bantuan Hukum ke Depan yang Berperspektif Kelompok Rentan" - Gregorius Yoseph Laba
124. Moderator dalam Seminar Publik TAF Hukum Acara Perdata - Gregorius Yoseph Laba
125. MC dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership - Gregorius Yoseph Laba
126. Moderator dalam FGD bersama LPSK dan Victim Support Unit terkait Victim Trust Fund di Uni Eropa - Gregorius Yoseph Laba
127. Moderator dalam OGP Asia-Pacific Peer Learning Experience - Gregorius Yoseph Laba



128. Fasilitator pemberdayaan hukum di Desa Jangkar, Bangkalan, Madura, Jawa Timur - Gregorius Yoseph Laba
129. Moderator OGP Aspac Conference - M Rizaldi
130. Moderator ABS Australia - Gol: Discussion on Developing National Crime Statistics - M Rizaldi
131. Moderator Launching riset pedoman kejaksanaan - M Rizaldi
132. Moderator Launching Riset Cost of Justice - M Rizaldi
133. Narasumber OGI Week - Refleksi OGI dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia - M Rizaldi
134. Narasumber Hakordia PT. Patrajasa "collective action" - M Rizaldi
135. Narasumber Lokakarya advokasi RUU TPPO Migrant Care - M Rizaldi
136. Narasumber Pemantauan dan Evaluasi Putusan MK 24/2004 - M Rizaldi
137. Narasumber Kelas Kriminologi UI - Kajian RUU Anti Diskriminasi - M Rizaldi
138. Narasumber Kelas STIH Adhyaksa - GEDSI - M Rizaldi
139. Narasumber Kelas STIH Adhyaksa - Akses Keadilan - M Rizaldi
140. Narasumber Dialog Kupang Pagi RRI "Penyelundupan Manusia" - M Rizaldi
141. Narasumber Berkas Kompas TV: "Rakyat Kecil di rimba Hukum" - M Rizaldi
142. Narasumber Perkara Indosurya di Kemenkopolhukan - Adery Ardhan S

Tulisan

1. Strengthening The Role of Community-Based Paralegals in Enhancing Access to Justice in Indonesia - Marsha, Arsa, Gladys, Bunga
2. Laporan Perlindungan Anak - Bersama Herni dan Marsha dan Arsa
3. Tulisan di The Conversation Indonesia "Rapor merah reformasi hukum peradilan pidana Jokowi, PR untuk Prabowo" - Gladys Nadya
4. Penelitian LK2FHUI X IJRS "Kajian tentang investigasi jurnalisme dalam RUU Penyiaran" (Rampung Januari 2025) - Saffah Salisa
5. Journal The Urgency of Restructuring The Criminal Provisions of The Narcotics Law Number 35 Year 2009 - Alexander, Siti Ismaya, Aisyah Assyifa, Matheus Nathanael
6. Jurnal Internasional: Evidence from criminal law experts in Indonesian criminal trials: Usurping the judicial function - Andreas N Marbun
7. The Conversation : Disparitas pembedanaan: mengapa pelaku kekerasan seksual bisa mendapat hukuman berbeda-beda untuk kasus serupa? - Arianda Lastiur P

Kutipan

Disparitas Pembedanaan

1. Artikel tentang Disparitas Kekerasan Seksual berjudul "Disparitas pembedanaan: mengapa pelaku kekerasan seksual bisa mendapat hukuman berbeda-beda untuk kasus serupa?" - Siti Ismaya. <https://theconversation.com/disparitas-pembedanaan-mengapa-pelaku-kekerasan-seksual-bisa-mendapat-hukuman-berbeda-beda-untuk-kasus-serupa-226102>



Diseminasi Monev & UU TPKS di Kejaksaan

1. <https://jurnalpatrolinews.co.id/nasional/kejakung-dan-ijrs-tingkatkan-akses-keadilan-bagi-perempuan-dan-anak/>
2. <https://www.teropongmalut.com/kejaksaan-agung-bersama-ijrs-luncurkan-hasil-penelitian-untuk-mendukung-peradilan-berkeadilan-gender/>
3. <https://www.delikasia.com/headline-news/hasil-penelitian-kejaksaan-agung-dan-ijrs-dukung-penerapan-peradilan-berkeadilan-gender>
4. <https://www.publictrust.id/kejaksaan-agung-dan-ijrs-luncurkan-hasil-penelitian-mendukung-peradilan-yang-berkeadilan-gender>
5. <https://belanegaraneews.com/2024/12/04/kejaksaan-agung-dan-ijrs-luncurkan-hasil-penelitian-mendukung-peradilan-yang-berkeadilan-gender/>
6. <https://www.google.com/amp/s/www.heloidonesia.com/nasional/amp/35538/kejaksaan-agung-dan-ijrs-luncurkan-hasil-penelitian-mendukung-peradilan-yang-berkeadilan-gender/>
7. <https://www.sambar.id/2024/12/kejaksaan-agung-dan-ijrs-luncurkan.html>

Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika. (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021)

1. <https://tribratatv.com/kepala-kejaksaan-tinggi-dki-jakarta-sebagai-narasumber-pada-diseminasi-hasil-penelitian-asesmen-penerapan-pedoman-kejaksaan-terkait-penanganan-perkara-narkotika/>
2. <https://www.hariansib.com/nasional/406071/rudi-margono-tuntutan-bagi-pelaku-narkoba-tidak-selamanya-memuaskan-banyak-pihak/>

Pelatihan Advokat terkait UU TPKS

1. <https://innews.co.id/bekali-advokat-kolaborasi-peradi-ijrs-asia-foundation-bedah-uu-tpks/>
2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-peran-advokat-dalam-penanganan-tpks-lt66dba2f6cf247/>

SHElebrate X KataHukum 2024

1. <https://www.bara-news.com/bersama-melawan-kekerasan-menegakkan-keadilan-hukum-untuk-perempuan-2/>
2. <https://perisaihukum.com/2024/11/22/bersama-melawan-kekerasan-menegakkan-keadilan-hukum-untuk-perempuan/>
3. <https://megapolitannews.icu/2024/11/22/bersama-melawan-kekerasan-menegakkan-keadilan-hukum-untuk-perempuan/>
4. <https://liputan3.icu/bersama-melawan-kekerasan-menegakkan-keadilan-hukum-untuk-perempuan/>
5. <https://actualnews.id/berita/bersama-melawan-kekerasan-menegakkan-keadilan-hukum-untuk-perempuan/>
6. <https://magdalene.co/story/shelebrate-dan-kata-hukum/>
7. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komitmen-kai-perangi-kekerasan-terhadap-perempuan--advokai-perempuan-bicara-tentang-keadilan-hukum-lt67511cba1a77d/>
8. <https://theconversation.com/kolaborasi-the-conversation-indonesia-di-shelebrate-2024-diskusi-interaktif-untuk-edukasi-penanganan-hukum-kekerasan-berbasis-gender-246263>



Hakim Cuti Bersama

1. <https://www.tempo.co/hukum/hari-terakhir-hakim-cuti-bersama-shi-kunjungi-pgi-dan-sejumlah-ngo-4>
2. <https://theconversation.com/aksi-cuti-bersama-hakim-seluruh-indonesia-pentingnya-meninjau-kembali-kesejahteraan-hakim-241474>
3. <https://www.tempo.co/arsip/aksi-hakim-cuti-bersama-tuntut-kesejahteraan-sudah-rampung-audiensi-ke-mana-saja-dan-apa-hasilnya--80015>

RUU Anti Diskriminasi

1. Diskriminasi SOGIESC Terus Terjadi, RUU Anti Diskriminasi Harap Jadi Solusi - Oktober 2024 - Aisyah Assyifa. <https://www.balairungpress.com/2024/10/diskriminasi-sogiesce-terus-terjadi-ruu-anti-diskriminasi-harap-jadi-solusi/>
2. RUU Anti-diskriminasi di hukumonline - Juli 2024 - Saffah Salisa. <https://www.hukumonline.com/berita/a/masyarakat-sipil-usulkan-ruu-penghapusan-diskriminasi-lt669f9055c5fcf/>
3. RUU anti-diskriminasi di Tirto - Juli 2024 - Saffah Salisa. <https://tirto.id/urgensi-ruu-penghapusan-diskriminasi-untuk-penanganan-hiv-aids-g1Xf>
4. RUU anti diskriminasi-Media indonesia Juli 2024 - Saffah Salisa. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/hapus-diskriminasi-bagi-orang-dengan-hiv>

Restorative Justice

1. Jelang Berlaku KUHP Nasional, Aturan Restorative Justice Perlu Sinkronisasi - Maret 2024 - Aisyah Assyifa. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jelang-berlaku-kuhp-nasional--aturan-restorative-justice-perlu-sinkronisasi-lt6602a44314216/>

UU ITE

1. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/pasal-pasal-bermasalah-revisi-uu-ite-631>
2. <https://www.tempo.co/hukum/kelompok-sipil-sorot-pasal-pasal-berbahaya-dalam-revisi-uu-ite-jilid-2-101261>
3. <https://seputarpapua.com/view/revisi-kedua-uu-ite-masih-pertahankan-pasal-pasal-karet-koalisi-serius-nyatakan-penolakan.html>
4. <https://www.liputan6.com/news/read/5497805/headline-jokowi-teken-revisi-uu-ite-masih-banyak-pasal-karet>
5. <https://zonautara.com/2024/01/05/revisi-kedua-uu-ite-menambah-pasal-baru-yang-berbahaya/>

Laki-laki & Kekerasan Seksual

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/12/14/maskulinitas-beracun-dalam-tren-laki-laki-tidak-bercerita?page=3>
2. <https://bandungbergerak.id/article/detail/159705/suara-setara-stereotip-maskulinitas-mengakibatkan-pelecehan-seksual-pada-laki-laki-menjadi-bahan-guyonan>



KDRT

1. Melibatkan laki-laki: perlunya konseling bagi pelaku KDRT guna menghentikan kekerasan terhadap perempuan - Maret 2024 - Bestha Inatsan Ashila. <https://theconversation.com/melibatkan-laki-laki-perlunya-konseling-bagi-pelaku-kdrt-guna-menghentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-225012>

Pantau Prabowo (reformasi hukum peradilan pidana)

1. Rapor merah reformasi hukum peradilan pidana Jokowi, PR untuk Prabowo - September 2024 - Gladys Nadya. <https://theconversation.com/rapor-merah-reformasi-hukum-peradilan-pidana-jokowi-pr-untuk-prabowo-237488>

Sextortion

1. <https://context.id/read/2322/waspada%2C-panduan-sextortion-daring-tersebar-di-medsos>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. <https://news.detik.com/kolom/d-7487505/keadilan-hukum-bagi-kelompok-rentan-penanganan-dan-perlindungan-korban-tpks>
2. <https://kumparan.com/itsna-yuni-wulandari/ojek-online-gerbang-baru-pelecehan-seksual-22NE0WU7Dja>

Long March

Women's March Jakarta

1. <https://mediaindonesia.com/humaniora/723970/womens-march-jakarta-2024-serukan-penghapusan-kekerasan-dan-diskriminasi>
2. <https://parboaboa.com/makna-women-march-jakarta-2024>

Award Bantuan Hukum

1. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-organisasi-masyarakat-sipil-raih-penghargaan-pemajuan-akses-keadilan-lt66ceca56d4aff/>

Narkotika

1. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkara-narkotika-jadi-beban-berat-peradilan-pidana-di-indonesia-lt664417fc2c3d6/>
2. Dikutip oleh Magdalene pada publikasi berjudul: Cinta Beracun: Ketika Romansa Jadi Alat Kendali Bandar Narkotika - Siti Ismaya. <https://magdalene.co/story/cinta-beracun-romansa-bandar-narkotika/>

RUU Pengumpulan Uang atau Barang

1. <https://nasional.sindonews.com/read/1484213/13/baleg-dpr-dukung-revisi-undang-undang-pengumpulan-uang-atau-barang-1730880687>



Perkawinan Anak

1. <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>

Revisi UU Polri

1. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597570/mengkhawatirkan-meningkatkan-pelanggaran-hak-asasi-manusia-koalisi-masyarakat-sipil-menolak-revisi-ruu-polri>
2. <https://www.suarakendari.com/read/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-ruu-kepolisian>

Pelatihan Jaksa terkait KUHP Baru

1. <https://www.rctiplus.com/news/detail/lintasbabel-inews-id/4628012/jaksa-di-babel-dibekali-pemahaman-kuhp-baru>
2. <https://okeyboz.com/index.php/2024/12/17/kejati-bangka-belitung-sosialisasikan-uu-no-1-tahun-2023-tentang-kuhp-baru/>

Pilkada Lembata

1. Publik Kritisi Debat Pilkada Lembata yang Minim Singgung Persoalan Utama Masyarakat - Oktober 2024 - Gregorius Yoris Laba. <https://floresa.co/reportase/peristiwa/68515/2024/10/29/publik-kritisi-debat-paslon-pilkada-lembata-yang-minim-singgung-persoalan-utama-masyarakat>

HLF MSP

1. <https://www.antaranews.com/berita/4271603/bappenas-mengundang-lebih-dari-40-cso-dalam-forum-hlf-msp-2024>

Keterlibatan di Conference

1. Regional Conference on “Achieving Just Societies: Inclusive Justice Pathways for People and Planet in Asia and the Pacific” - United Nations Conference Centre in Bangkok, Thailand. (Arsa Ilmi Budiarti dan Gladys Nadya A)
2. International Conference on Drugs Research and Policy 2024 - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (Saffah Salisa and Gladys Nadya A)
3. High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 – Side Event on “Innovative Budgeting for Justice: The Comprehensive Cost of Crime Approach” - Bali, Indonesia (Gladys Nadya A)
4. High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 – Side Event on “Innovative Financing to Accelerate SDG 16 in Indonesia” - Bali, Indonesia (Arsa Ilmi, Aisyah Assyifa, Marselino)





Komplek Pertanian, Jl. Palapa Timur No.6, RT.15/RW.5, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520



office@ijrs.or.id



@ijrs_official



ijrs.or.id



@lifeatijrs



@ijrs_official



IJRS TV



+62 821-2500-8141
(WhatsApp Chat Only)



Indonesia Judicial Research Society